ICCTF
Indonesia Climate Change Trust Fund

LAPORAN TRIWULAN 3

JULI - SEPTEMBER 2019

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif__2

Rencana Kerja ICCTF Tahun 2019__3

Progres dan Capaian__4

Pokja I Lingkungan Hidup__5

Highlight dan Capaian Utama__5

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi__9

Kemajuan Pelaksanaan Proyek Hibah ICCTF-UKCCU__22

Kemajuan Pelaksanaan Proyek Hibah ICCTF-USAID__28

Pokja II Energi__37

Highlight dan Capaian Utama__37

Pokja III Kelautan dan Perikanan__41

COREMAP-CTI__41

*Blended Finance*__45

*Blue Carbon*__47

Kesekretariatan__50

Komunikasi, *Outreach* dan Kemitraan__54

Keuangan dan Audit__58

Lampiran__61

Media Coverage__62

Ringkasan Eksekutif

Indonesia memandang bahwa upaya komprehensif adaptasi dan mitigasi berbasis lahan dan laut adalah bagian dari pertimbangan strategi dalam mencapai ketahanan iklim terkait pangan, air dan energi. Dalam mendukung upaya tersebut, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) sebagai lembaga *trust fund* di bidang perubahan iklim telah melaksanakan kegiatan mitigasi berbasis lahan dan adaptasi ketangguhan melalui berbagai proyek percontohan. Kegiatan yang dilakukan oleh ICCTF telah pula mendukung kebijakan Pembangunan Rendah Karbon yang diinisiasi oleh Bappenas, mengingat berbagai kegiatan ICCTF di bidang mitigasi berbasis lahan telah berkontribusi cukup signifikan terhadap penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sekaligus memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi serta penguatan aspek sosial masyarakat setempat.

ICCTF telah menjalin kerjasama dengan BRG sejak tahun 2016 melalui Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Pengelolaan Lahan Gambut Terkait Perubahan Iklim dan Pengelolaan Dana Restorasi Gambut di Indonesia. Kerja sama antara ICCTF dan BRG ini bertujuan untuk membantu mengimplementasikan rencana strategis kedua lembaga dalam meningkatkan upaya pemulihan lahan gambut yang rusak dan mencegah kebakaran lahan gambut . Kini, tantangan utama restorasi gambut adalah bagaimana memastikan keberlanjutan dari kegiatan yang telah terlaksana. Kolaborasi multipihak merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberlanjutan. Pada kuartal ketiga, IMPACT di Kalimantan Tengah. Rangkaian pertama dilakukan pada tanggal 28-30 Agustus 2019, dimana kegiatan berfokus untuk melakukan sensus terhadap 600 sumur bor yang telah dibangun ICCTF. Sensus ini dilakukan dengan melakukan input koordinat dan foto ke dalam Sistem Informasi (SISFO) yang dikembangkan oleh BRG sekaligus memastikan kondisi infrastruktur terbangun dalam kondisi baik dan berfungsi optimal.

Sampai dengan kuartal III tahun 2019, ICCTF melalui hibah USAID dan UKCCU telah membangun 356 sekat kanal, 1194 sumur bor dan 21 tower pemantau api, serta melalui beragam proyek percontohan telah berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pertanian organik dan pengembangan ekowisata. Sebagai upaya penilaian terhadap berbagai program dan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, ICCTF menyadari perlunya melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap dampak intervensi program. Oleh karena itu, pada periode ini telah dimulai penyusunan kajian evaluasi dampak program (*impact assessment*) terhadap 47 proyek yang didanai dengan hibah dari USAID dan UKCCU. Adapun dalam konteks penanganan perubahan iklim di tingkat kebijakan, ICCTF juga melaksanakan berbagai kajian tematik, khususnya dalam lingkup ekosistem gambut yang diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi pengambil kebijakan.

Dalam memperluas dampak dan potensi *scaling-up*, ICCTF terus berupaya membangun strategi komunikasi dan penjangkauan. Pada kuartal ketiga, ekspose proyek kerjasama ICCTF-UNEJ telah sukses diselenggarakan dengan turut dihadiri oleh Menteri PPN/Bappenas. Dalam ekspos tersebut, Bapak Bambang Brodjonegoro menekankan bahwa sektor pertanian dan lingkungan hidup adalah dua sektor yang harus selalu bersinergi, tidak dapat dipisahkan dan tidak pula saling bertentangan. Bapak Bambang Brodjonegoro juga meresmikan Desa Wonoasri – salah satu desa intervensi ICCTF– sebagai Desa Batik Pewarna Alam Meru Betiri. Harapannya, proyek-proyek yang ada dapat memberikan manfaat jangka panjang dan dapat dimanfaatkan secara inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui pengembangan UMKM.

ICCTF juga telah melaksanakan ekspose COREMAP-CTI Hibah Bank Dunia pada tanggal 15 Agustus 2019 di Jakarta. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Menteri Bappenas, Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Kepala LIPI, Deputi Ilmu Kebumian LIPI, Kepala Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) LIPI, dan Deputi IV Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Bidang Koordinasi, SDM, IPTEK dan Budaya Kemaritiman. Ekspose ini bertujuan sebagai wadah untuk memperkenalkan COREMAP-CTI kepada pemangku kepentingan serta masyarakat luas sekaligus menjaring masukan terhadap pengelolaan kawasan pesisir dan samudera.

Rencana dan pengembangan inisiasi *blended finance* terus dilakukan melalui berbagai pertemuan koordinasi, salah satunya melalui kegiatan *Round Table Focus Group Discussion* (FGD) *Blended Finance* di bidang kelautan dan perikanan bersama dengan ADB, PT.SMI dan OJK, RARE dan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara pada tanggal 25 September 2019 di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi daftar infrastruktur yang perlu dibangun melalui pinjaman dengan mekanisme *blended finance* di kedua daerah tersebut.

Tahun ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan proyek ICCTF yang didanai oleh hibah dari USAID dan UKCCU. Pada periode ini, ICCTF berfokus untuk mempersiapkan penutupan proyek dan merumuskan strategi untuk memastikan keberlanjutan program. Salah satunya, ICCTF terus menjalin komunikasi dengan Kementerian/Lembaga melalui serangkaian pertemuan konsultatif untuk mendorong replikasi dan *scaling-up*.

Rencana Kerja
ICCTF Tahun 2019

Q1 JAN-MAR

- Media & Donor Visit USAID ke Sumba Timur
- Ekspo Proyek di tingkat Provinsi
- Penyusunan *Project Identification Form* untuk GEF (Topik *Sustainable Cities* dan *Biodiversity*)
- Kegiatan baru dengan pembiayaan UKCCU
- Penandatanganan *Grant Agreement* dengan WB & ADB
- Pelaksanaan COREMAP
- Rapat MWA I – 2019
- *Annual Review Project* ICCTF 2018
- Dukungan pada Peluncuran Laporan Kajian Rendah Karbon Indonesia (LCDI)
- Dukungan pada *Workshop* Konsultasi Publik KLHS
- *Programmatic Monitoring* dan *Financial Spotcheck*
- Partisipasi dalam *3rd Ministerial Conference of The Partnership for Actionon Green Economy in Cape Town, South Africa*

Q2 APR-JUN

- Submit proposal baru untuk mendapatkan pendanaan ke GEF
- Penutupan proyek UKCCU (5 Proponen)
- Penutupan proyek USAID (6 Proponen)
- Peningkatan kapasitas staf ICCTF
- *Outcome Workshop* untuk penutupan proyek USAID & UKCCU
- Dukungan Penandatanganan MOU LCDI MPPN dengan Pemprov Jabar dan Papua Barat
- *Workshop* Penyusunan *Quarterly Monitoring Report I* dan *Newsletter*
- *Programmatic Monitoring* dan Panen Raya Padi SRI di Sumba Timur
- Pelaksanaan COREMAP-CTI

Q3 JUL-SEP

- ICCTF *Day*
- *Kick-off* Program baru ICCTF
- *Soft skill Training* untuk staf ICCTF
- *Media & Donor Visit* UKCCU
- *Fundraising* untuk donor potensial (bilateral/multilateral)
- *Submit* proposal baru - *Renewable Energy*
- *Joint Monitoring* ICCTF-BRG
- Kunjungan Menteri PPN dan Peresmian Desa Wonoasri sebagai Pusat Batik Meru Betiri
- Pelaksanaan Kajian Tematik dan *Impact Assessment*
- *Workshop* Perhitungan Luasan Terdampak Lahan Gambut

Q4 OKT-DES

- UNFCCC COP-25
- *Fundraising* untuk donor potensial (bilateral/multilateral)
- *Closing Program* PMU USAID & UKCCU
- ICCTF *Annual Report 2019*
- ICCTF *Annual Work Plan 2020*
- Rapat MWA II - 2019

Komitmen ICCTF untuk terus mendukung Pemerintah Indonesia dalam penanganan perubahan iklim tertuang dalam rencana kerja tahun 2019 yang telah disepakati Majelis Wali Amanat (MWA) ICCTF pada tahun lalu. Periode kuartal ketiga ini berfokus untuk mempersiapkan penutupan proyek swakelola dengan pendanaan hibah UKCCU dan USAID. Pada kuartal ketiga, ICCTF juga telah sukses menyelenggarakan ekspos dan peresmian Desa Wonoasri yang merupakan desa binaan ICCTF dan UNEJ sebagai Desa Batik Pewarna Alam Meru Betiri dan kegiatan Ekspos Proyek COREMAP-CTI yang dibiayai hibah Bank Dunia.

Secara garis besar, rencana kerja pada kuartal keempat akan berfokus pada penyelenggaraan pertemuan rutin Majelis Wali Amanat ICCTF tahun 2019, penyusunan laporan akhir tahun 2019, strategi replikasi dan *scaling-up*, serta penutupan program USAID dan UKCCU. Selain itu, ICCTF juga akan berpartisipasi dalam UN Climate Change Conference (COP25) yang akan dilaksanakan di Santiago, Chile pada bulan Desember mendatang.

Progres & Capaian

Kelompok Kerja Lingkungan Hidup 1

Highlight dan Capaian Utama

Pemantauan Bersama (*Joint Monitoring*) ICCTF dan BRG

ICCTF bersama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) telah melaksanakan rapat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan gambut pada tanggal 20 Agustus 2019 di Kantor BRG. Pertemuan tersebut menyepakati adanya pelaksanaan kegiatan pemantauan bersama (*joint monitoring*) terhadap kegiatan restorasi gambut yang dilakukan oleh proponen ICCTF, baik yang termasuk dalam Batch 1 maupun Batch 2 di 5 (lima) provinsi target BRG.

Pelaksanaan *joint monitoring* pertama dilakukan pada tanggal 28-30 Agustus 2019, dimana kegiatan berfokus untuk melakukan sensus 600 sumur bor yang telah dibangun ICCTF-P2KLH UPR di 6 desa yaitu Desa Tumbang Nusa, Desa Tanjung Taruna, Desa Pilang, Desa Henda, Desa Gohong dan Desa Garung. Sensus ini dilakukan dengan melakukan input koordinat dan foto ke dalam Sistem Informasi (SISFO) yang dikembangkan oleh BRG. Aplikasi tersebut, selain mengakomodir foto terkini dan lokasi sumur bor, juga dapat melakukan input kondisi spesifik apabila terdapat konstruksi yang rusak atau hilang.Kegiatan ini juga melibatkan tim P2KLH dan Masyarakat Peduli Api (MPA) desa setempat. Secara keseluruhan, kegiatan sensus sumur bor dan proses input ke dalam SISFO telah selesai dilaksanakan. Kegiatan pemantauan bersama selanjutnya direncanakan dilaksanakan di bulan Oktober-November.

Pelaksanaan Kajian Tematik ICCTF

Pada kuartal ini, ICCTF mulai melaksanakan penyusunan kajian tematik melalui pembiayaan dari hibah UKCCU. Pertemuan pembahasan Laporan Awal (*Inception Report*) bersama keempat tim konsultan terpilih telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2019 di Bogor. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengakomodir masukan terhadap laporan awal yang telah disusun tim konsultan. Pertemuan tersebut juga menyepakati adanya pertemuan rutin dua mingguan antara tim konsultan dan Sekretariat ICCTF untuk memastikan ritme dan proses penyusunan kajian berjalan sesuai dengan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan. Pertemuan rutin pertama telah diselenggarakan di Bogor pada tanggal 12 September 2019.

Presentasi laporan pendahuluan kajian pemetaan lahan gambut menggunakan citra satelit aktif-pasif (PT. Agrisoft Citra Buana)

Presentasi laporan awal yang telah disusun terkait kajian identifikasi dan validasi peta gambut papua (PT. Ayamaru Bakti Pertiwi)

Presentasi laporan pendahuluannya terkait kajian valuasi ekonomi (PT. Gatri Baji Andari)

Presentasi oleh sebagia pelaksana kajian bioprospeksi (PT Centra Multicon)

Foto bersama dengan seluruh peserta dan tim konsultan

Secara lebih rinci, gambaran umum keempat kajian ini adalah sebagai berikut:

- **Kajian Identifikasi dan Validasi Peta Ekosistem Gambut di Pulau Papua**
  Ketidakseragaman informasi pada peta gambut Pulau Papua saat ini menjadi isu penting untuk dikaji dan diverifikasi, terutama dalam penggunaannya untuk perencanaan pembangunan rendah karbon. Untuk itu, kegiatan kajian ini bertujuan untuk menghasilkan model verifikasi, data dan informasi peta ekosistem gambut yang lebih akurat mengenai keberadaan dan kondisi ekosistem gambut di Pulau Papua. Data, informasi, dan peta gambut yang terverifikasi dan menyeluruh diharapkan dapat mendukung penyusunan rencana pembangunan rendah karbon di ekosistem gambut Pulau Papua.

- **Pemetaan dan Analisis Lahan Gambut di Indonesia Menggunakan Citra Satelit Aktif dan Pasif**
  Kegiatan bertujuan untuk melakukan pemetaan gambut secara menyeluruh menggunakan analisis data citra satelit aktif dan pasif terbaru (tahun 2018 dan 2019), serta analisis geostatistik. Hasil akhir kegiatan ini adalah Peta Lahan Gambut skala 1:100.000 dalam bentuk geodatabase dan peta cetak. Disamping itu, kegiatan juga bertujuan untuk mengembangkan peta interaktif berbasis web (web GIS) lahan gambut di Indonesia.

  Kegiatan ini akan menggunakan berbagai macam metode yang telah dikembangkan dari berbagai sumber yaitu: Google Earth Engine, Digital Soil Mapping, Geostatistik, dan Machine Learning. Adapun sumber data utama yang digunakan adalah Sentinel-1, Sentinel-2, peta tanah, dan DEMNAS. Dengan analisis menggunakan citra satelit tersebut diharapkan akan memperoleh tingkat akurasi hasil pemetaan lahan gambut minimum 80%.

- **Kajian Biodiversitas dan Bioprospeksi pada Ekosistem Gambut**
  Kajian ‘Biodiversitas dan Bioprospeksi Ekosistem Lahan Gambut’ dilaksanakan di Taman Nasional Berbak Provinsi Jambi dan Taman Nasional Sebangau Provinsi Kalimantan Tengah. Periode kajian dimulai sejak bulan September hingga bulan Desember 2019 atau selama empat (4) bulan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan identifikasi secara holistik potensi keanekaragaman hayati yang potensial untuk dikembangkan di kawasan gambut. Hal ini mencakup diadakannya identifikasi biodiversitas flora dan fauna pada ekosistem gambut; identifikasi dan kajian mendalam terkait bioprospeksi yang meliputi plasma nutfah, sumber obat-obatan, sumber pangan, dan sumber potensi lainnya yang bernilai sosial, ekonomi, dan lingkungan di kawasan gambut; identifikasi kebijakan nasional dan daerah terkait dengan pengembangan pengelolaan bioprospeksi dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan yang berkelanjutan dan pengembangan ekonomi daerah; penyusunan kebijakan dan program pengembangan bioprospeksi dalam rangka pembangunan kawasan gambut yang berkelanjutan dan pengembangan ekonomi; dan diseminasi hasil kajian. Dengan begitu, eksplorasi potensi keanekaragaman hayati yang dilakukan dalam kajian ini akan menonjolkan sumber daya genetik dan biokimia yang mempunyai nilai secara komersial yang mampu meningkatkan kesejahteraan manusia di kawasan sekitarnya.

- **Kajian Valuasi Ekonomi dan Mekanisme Insentif**
  Kegiatan penyusunan kajian ini bertujuan untuk melakukan valuasi ekonomi ekosistem gambut, sehingga dapat diperoleh gambaran kepentingan ekosistem gambut bagi kelestarian fungsi ekologisnya dan kehidupan manusia berdasarkan nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungannya. Selain itu juga menyusun desain insentif yang cocok dengan mempertimbangkan keberlanjutan lahan gambut dan juga keberlanjutan pemenuhan nafkah masyarakat yang tinggal di dalamnya.

  Kajian ini juga berfokus pada aspek institusional, terutama dalam aspek pembiayaan Pengelolaan Lahan Gambut berkelanjutan. Pembiayaan Pengelolaan Lahan Gambut berkelanjutan terbatas pada pembiayaan insentif yang perlu diberikan terhadap masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan gambutnya. Dalam penelitian ini dilihat alternatif pembiayaan baik dari APBN, APBD, badan usaha dan masyarakat serta mitra pembangunan lainnya untuk mendukung pelaksanaan perlindungan Lahan Gambut berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam kajian ini mencakup analisis ekosistem gambut, analisis lingkungan, analisis sosial ekonomi, analisis pemangku kepentingan, penentuan jenis dan mekanisme insentif, serta penyusunan perencanaan dan konsep pembiayaan.

Pelaksanaan Kajian Evaluasi Dampak (*Impact Assessment*) Proyek ICCTF

Pada tahun 2018, ICCTF mengelola kegiatan dengan pendanaan APBN dan hibah meliputi hibah USAID, UKCCU dan DANIDA. Kegiatan yang dilaksanakan melalui dana hibah USAID dan UKCCU merupakan kegiatan-kegiatan penanganan perubahan iklim yang dilaksanakan oleh mitra pelaksana ICCTF melalui aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pada periode tahun 2018, ICCTF mengelola 33 proyek dengan pendanaan USAID dan 16 proyek dengan pendanaan UKCCU.

Identifikasi mengenai capaian dan dampak dari intervensi kegiatan ICCTF baik dalam aspek ekonomi, lingkungan dan sosial telah mulai dilakukan oleh sekretariat ICCTF, namun hal tersebut dilakukan secara umum dan tidak sistematis. Oleh karena itu, sebagai upaya penilaian terhadap berbagai program dan kegiatan ICCTF yang telah selesai dilaksanakan dengan pembiayaan berasal dari hibah UKCCU dan USAID, diperlukan adanya evaluasi menyeluruh terhadap dampak intervensi program yang telah dilakukan.

Evaluasi terhadap dampak program (*impact assessment*) tersebut sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan yang telah dilakukan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dari sisi lingkungan, ekonomi dan sosial. Di sisi lain, evaluasi dampak program tersebut diharapkan dapat memastikan keberlanjutan pelaksanaan program (*sustainability*) meskipun dukungan dari ICCTF telah berakhir.

Pada periode ini, telah dilakukan *Workshop* Pembahasan Laporan Pendahuluan (*Inception Report*) Evaluasi Dampak Proyek ICCTF yang dilaksanakan pada hari Senin, 9 September 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodir masukan terhadap laporan awal yang telah disusun tim konsultan, terutama mengenai metode dan rencana pelaksanaan pengambilan data di lapangan. Dari jalannya diskusi, telah disepakati berbagai tindak lanjut terhadap masukan, termasuk penajaman metodologi dan penentuan parameter-parameter dalam mengukur dampak proyek agar kajian ini nantinya dapat dampak dari intervensi proyek dapat lebih terkuantifikasi.

Pembaruan Perhitungan Stok Karbon dari Proyek ICCTF

Pada tahun 2017, ICCTF telah melakukan perhitungan stok karbon, dimana penurunan emisi CO_2 ekuivalen melalui intervensi ICCTF mencapai 9,4 juta ton CO_2eq. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbarui perhitungan capaian penurunan emisi GRK dari seluruh program kegiatan ICCTF, baik pada lahan gambut maupun lahan mineral. Disamping itu, kegiatan juga bertujuan untuk melakukan verifikasi ke lapangan terkait dengan capaian yang diperoleh di beberapa lokasi kegiatan proyek. Saat ini, proses penyusunan kajian dalam tahap identifikasi informasi dan gap metodologi (definisi, asumsi dan faktor konversi) dalam konteks pengukuran emisi GRK dan stok karbon dari kegiatan-kegiatan ICCTF yang telah dilaporkan sebelumnya. Dalam penyusunan kajian ini, akan ditentukan juga *baseline* data yang digunakan untuk mengevaluasi penurunan emisi GRK dan penyeragaman metode evaluasi.

Workshop Perhitungan Dampak Luasan Area Restorasi dari Pembangunan Infrastruktur Pembasahan di Lahan Gambut

ICCTF bekerja sama dengan ahli hidrologi dan ahli perhitungan karbon untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan mengenai lahan gambut, dan secara khusus melakukan perhitungan luasan area terdampak dari pembangunan infrastruktur di lahan gambut, seperti sekat kanal, penanaman kembali (revegetasi), dan sumur bor.

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi

Pada tahun 2019, kelompok kerja (Pokja) I Lingkungan Hidup melanjutkan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, diantaranya melalui scaling-up proyek-proyek yang dinilai berdampak signifikan, serta melaksanakan program tata kelola hutan dan gambut di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Siak-Kampar di Riau dan KHG Sungai Kapuas Barito di Kalimantan Tengah.

Seluruh proyek ICCTF yang dilaksanakan oleh proponen dengan pendanaan dari USAID dan UKCCU diawasi dan dimonitor secara ketat oleh ICCTF sejak dari proses perencanaan, implementasi di lapangan sampai dengan pelaporan, baik dari sisi program, maupun keuangan. Pelaksanaan program baik dari sisi program dan keuangan perlu dipantau secara berkala dengan melakukan kunjungan lapangan, termasuk untuk validasi kemajuan dan capaian yang telah dilaporkan oleh proponen.

Pada periode triwulan III, terdapat 1 proyek ICCTF dengan fokus area mitigasi berbasis lahan dibawah pendanaan UKCCU yang telah berakhir pada bulan Agustus 2019 dengan mitra pelaksana P2KLH UPR. Adapun 5 proyek USAID juga telah berakhir pada bulan Juli 2019. Selama kuartal ketiga, beberapa kegiatan kunjungan lapangan dalam rangka pemantauan dan evaluasi baik dari sisi program (programmatic monitoring) dan keuangan (financial spotcheck) maupun pemeriksaan Barang Milik Negara (BMN) telah dilakukan ke beberapa lokasi proyek untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek dengan rencana kerja, serta sebagai upaya penyelesaian isu dan permasalahan di lapangan. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dari sisi program, dilihat dari sisi risiko, sebagian besar proyek USAID mendapatkan status low-risk dan hanya terdapat satu proyek yang mendapatkan status medium-risk.

Tanggal	Pendanaan	Proponen	Lokasi	Kegiatan	Tindak Lanjut
5 – 9 Agustus 2019	UKCCU	RWWG, YMI, dan Elang	Kabupaten Siak, Riau	Pemantauan dan Evaluasi Program	1. Konsorsium Elang melengkapi dokumen dan melakukan perbaikan di salah satu sumur bor, dan mengirimkan video dokumentasi ke ICCTF. 2. Seluruh mitra pelaksana melengkapi dokumen sesuai dengan checklist yang telah disusun ICCTF. 3. ICCTF melakukan review terhadap dokumen akhir sesuai dengan output di kerangka logis.
10 – 13 September 2019	UKCCU	RWWG dan Elang	Kabupaten Siak, Riau	Pemeriksaan BMN	1. Penyusunan Berita Acara Serah Terima BMN dari Bappenas ke kelompok masyarakat. 2. ICCTF dan Mitra pelaksana memastikan keberlanjutan kegiatan dan pemeliharaan barang dan asset yang telah diserahterimakan.
19 – 21 September 2019	UKCCU	UNKRIP	Ex PLG Blok E, Kapuas Kalteng	Pemeriksaan BMN	Pelaksanaan proses BAST
16-19 Juli 2019	USAID	Lembaga Olah Hidup (LOH)	Sumbawa, NTB	Pemantauan dan Evaluasi Program dan Pemeriksaan Keuangan	1. Penyampaian dokumen output LOH. 2. LOH akan menyesuaikan proyek dengan rekomendasi yang disampaikan pada saat pemantauan.
20-21 Agustus 2019	USAID	Yayasan Orang Utan (Yayorin)	Kotawaringin Barat	Pemantauan dan Evaluasi Program	Pemeriksaan BMN
22-24 Agustus 2019	USAID	Universitas Tanjungpura	Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat	Pemantauan dan Evaluasi Program	Pemeriksaan BMN
8-11 September 2019	USAID	Lembaga Olah Hidup (LOH)	Sumbawa, NTB	Pemeriksaan BMN	Pelaksanaan proses BAST

Terdapat tujuh (7) aktivitas monitoring dan evaluasi yang mencakup peninjauan program, pemeriksaan keuangan, dan pemeriksaan BMN. Hasil dari peninjauan dan pemeriksaan tersebut dapat dilihat dalam deskripsi berikut.

1. Monitoring dan Evaluasi Program serta Pemeriksaan Keuangan – Lembaga Olah Hidup (LOH) (16-19 Juli 2019)

Monitoring dan evaluasi program serta pemeriksaan keuangan ICCTF-LOH dilaksanakan pada tanggal 16-19 Juli 2019 di Sumbawa. Beberapa poin yang perlu disoroti dari hasil kunjungan adalah:

- Semua keluaran yang direncanakan di awal proyek telah berhasil dilaksanakan dan/atau sedang dalam tahap akhir pelaksanaan.
- Penanaman 30,000 bibit mangrove telah dilakukan di tiga (3) desa seluas 75 ha dan diadakan penyulaman setiap minggunya. Namun terdapat gangguan dari sampah plastik, rob, sapi atau kerbau, dan lumut yang membuat tanaman rusak dan mati.
- 12.000 ekor bandeng yang sudah disebar di beberapa tambak akan siap dipanen di bulan September atau Oktober.
- Pembuatan film dokumenter sedang dalam proses editing akhir dan akan dicetak sebanyak 250 CD.
- Pemerintah desa dari Desa Olat Rawa berkomitmen untuk membantu keberlanjutan program dengan bantuan dari BUMDES untuk mendukung petani organik dan membantu pemasaran produk hasil proyek.
- Di Desa Olat Rawa, terdapat petani organik yang berhasil menghasilkan produk jagung sebesar 11-12 ton/ha dengan biaya produksi lebih rendah. Selain itu, peningkatan pendapatan masyarakat yang memproduksi jagung mencapai angka RP 20-30 juta/kk bahkan hingga Rp 100 juta/tahun.
- Di Dusun Nangalidam, kelompok HKm telah menyetorkan PNBP HHBK sebesar Rp 3,9 juta.

Hasil dari monitoring dan evaluasi program serta pemeriksaan keuangan LOH adalah low-risk.

Diskusi terkait proyek dengan LOH di kantor secretariat LOH.

Berdiskusi dengan petani organik terkait hasil panen jagung dan hortikultura.

Pemeriksaan keuangan dan administrasi di kantor LOH.

Monitoring revegetasi tambak.

2. Monitoring dan Evaluasi Program – Yayasan Orang Utan (Yayorin) (20 - 21 Agustus 2019)

Monitoring dan evaluasi program ICCTF-Yayasan Orang Utan (Yayorin) dilaksanakan pada tanggal 20 – 21 Agustus 2019 di Kalimantan Tengah. Beberapa poin terkait program yang perlu disoroti adalah:

- Semua keluaran yang direncanakan di awal proyek telah berhasil dilaksanakan dan/atau sedang dalam tahap akhir pelaksanaan.
- Saat ini masyarakat lokal terutama Masyarakat Peduli Api telah berkoordinasi dan berkolaborasi bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), DAOP 3 Manggala Agni, TNI, Dinas Kehutanan dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,dan Perkebunan untuk menanggulangi permasalahan kebakaran hutan.
- Di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, bibit tanaman kehutanan telah tertanam di lahan seluar 400 meter dan dalam kondisi yang baik. Namun bibit ikan yang telah diterima belum disebarkan ke area budidaya ikan karena kondisi air masih memiliki PH yang selalu berubah.

Hasil dari monitoring dan evaluasi program Yayorin adalah low-risk.

Lokasi Restorasi Gambut.

Tim menuju ke lokasi restorasi gambut dan keramba apung di Kelompok Swadaya Masyarakat Tani Sejati.

Team dilokasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar di Kelompok Tani Sumber Rezeki.

Pos Karhutla dan menara pantau di Kelompok MPA Cahaya Fajar.

3. Monitoring dan Evaluasi Program – Universitas Tanjungpura (UNTAN) (22 - 24 Agustus 2019)

Monitoring dan evaluasi program ICCTF-Universitas Tanjungpura (UNTAN) dilaksanakan pada tanggal 23 – 24 Agustus 2019 di Kalimantan Barat. Beberapa poin terkait program yang perlu disoroti adalah:

- Semua keluaran yang direncanakan di awal proyek telah berhasil dilaksanakan dan/atau sedang dalam tahap akhir pelaksanaan.
- Adanya diskusi mengenai keberlanjutan dari produk yang dihasilkan proyek yaitu pelet sebagai energi terbarukan dengan PT. Cakrawala Persada Biomas. PT.Cakrawala Persada mengalami kesulitan tentang hasil produksi yang terpaku pada peraturan pemerintah tentang pembatasan penebangan dan pengambilan bahan baku yaitu kayu. Sehingga terdapat kemungkinan kerjasama hasil produksi dari proyek dengan perusahaan terkait penyediaan pelet.
- Aktivitas pengolahan air gambut menjadi air siap minum masih dijalankan dengan baik oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Peniti Dalam I, serta Kelompok Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS).
- Di Desa Peniti Dalam I, terdapat sumur bor dengan kedalaman kurang lebih 40 meter yang digunakan untuk menopang sumber air dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.
- Di Desa Peniti Dalam II, terdapat alat nyapar dengan kondisi baik yang siap digunakan untuk pelatihan dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.
- Belum adanya alokasi dana melalui Anggaran Dana Desa (ADD) untuk biaya pemeliharaan dan keberlanjutan dari program ICCTF-UNTAN.

Hasil dari monitoring dan evaluasi program UNTAN adalah low-risk.

Team berdiskusi tentang pemanfaatan yang lebih dari sumur bor.

Melihat pengelolahan air gambut menjadi air layak minum di kelompok Pengelolah Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) Desa Peniti Dalam I.

Team singgah di PT. Cakrawala Persada Biomass di Kecamatan Segedong, Kab Mempawah.

Nyapar yang digunakan sebagai alat pemadam api apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di Desa Peniti Dalam II Kecamatan Segedong, Kab Mempawah.

4. Pemeriksaan BMN – Lembaga Olah Hidup (LOH) (8 - 11 September 2019)

Pemeriksaan BMN dari program ICCTF-Lembaga Olah Hidup (LOH) dilaksanakan pada tanggal 8–11 September 2019 di Sumbawa, Nusa Tengara Barat. Beberapa poin terkait BMN yang perlu disoroti adalah:

- Di desa Teluk Santong, bibit mangrove dan bit tertanam dengan baik di lokasi kelompok Teluk Raya. Tambak bandeng/nener seluas 100 ha di kelompok Nusa Pantai sudah mengalami masa panen sebanyak dua (2) kali dan mencapai angka sebesar 500 kg (Rp15.000/kg).
- Di Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, beberapa perkembangan kelompok tani sebagai berikut:
  - Kelompok tani Genang Genis telah menjaga tanaman kayu dingin, tanaman sengon, tanaman mahoni, dan tanaman sayur mayuran dalam keadaan baik dan terawat.
  - Kelompok Ai Ne Hayel telah merawat bibit mangrove dengan baik dan menggabungkan teknologi penanamannya dengan alat wadah bambo untuk menguatkan akar dari bibit mangrove. Untuk bibit bandeng, telah dikelola di tambak dan akan dipanen pada bulan November.

Hasil dari pemeriksaan BMN LOH adalah low-risk.

Koordinasi dikantor LOH sebelum melakukan perjalanan ke Kecamatan Plampang.

Lokasi penanaman Bibit Manggrove di Kelompok Teluk Raya Kec Plampang.

Swadaya bibit tanaman Asam dan Kluih di Kelompok Genang Genis Kec. Lape.

Ikan Bandeng di Kelompok Ai Ne Hayel.

5. Pemeriksaan BMN proponen Konsorsium RWWG, Konsorsium Elang dan UNKRIP (10 - 13 September 2019)

Kegiatan pemeriksaan BMN dilaksanakan pada 10 – 13 September 2019 pada 2 mitra pelaksana ICCTF-UKCCU, yakni Konsorsium Riau Women Working Group (RWWG) dan Perkumpulan Elang. Kegiatan ini turut mengundang Biro Umum dan Inspektorat Bidang Administrasi Umum (IBAU) Bappenas sebagai tim pemeriksa Barang Milik Negara (BMN) dan memastikan seluruh BMN telah diserahterimakan kepada masyarakat penerima manfaat.

Pada saat pengecekan kondisi BMN, Riau masih dalam keadaan diselimuti kabut asap hasil kebakaran hutan dan lahan. Tim ICCTF bersama Tim Bappenas melakukan pemeriksaan BMN hasil pelaksanaan kegiatan oleh mitra pelaksana RWWG di Kampung Parit I/II menggunakan jalur darat dengan jarak pandang terbilang masih normal. Tim memastikan BMN dalam kondisi lengkap dan berfungsi dengan baik. Sejumlah barang yang dilakukan pemeriksaan antara lain:

1. Peralatan Pencegahan Kebakaran seperti Pompa Air, Pacul, Peralatan Tim Penanggulangan Api, Sekop, Parang, Cangkul, dll.
2. Sekat Kanal, namun kondisi air sudah kering.
3. Sumur Bor
4. Tower Pemantau Api,
5. Demonstration Plot (Demplot) Penanaman Bibit Bawang Merah, Kayu Putih, Cocor Bebek, Daun Ungu, Kumis Kucing dan Serai Wangi
6. Papan Petunjuk Aset (Plang)
7. Ekowisata Mangrove yang terdiri dari gazebo, fasilitas toilet dan spot untuk foto.

Selain itu, Kelompok Masyarakat (POKMAS) mengikuti beberapa kegiatan antara lain pelatihan, kegiatan fisik pencegahan kebakaran lahan gambut dan penanaman yang akan meningkatkan perekonomian mereka serta bantuan aset yang berguna untuk menunjang peningkatan taraf hidup masyarakat dan pencegahan kebakaran.

Lokasi Penanaman Tanaman Bawang merah di Kampung Parit 1 dan 2.

Aset Rumah Pembibitan Tanaman Bawang Merah.

Alat Smart Farming.

Sumur Bor di Kampung Parit 1 dan 2.

Aset Peralatan Perajang Bawang Merah.

Aset Peralatan Pembajak Tanah di Kampung Parit 1 & 2.

Aset Peralatan Pompa Sprayer.

Aset Peralatan Pemadaman Kebakaran.

Aset Sekat Kanal di Kampung Parit 1 & 2.

Aset Menara Pantau di Kampung Parit 1 & 2.

Aset Demplot di Kampung Sungai Kayu Ara.

Aset Alat Pengering Bawang Goreng di Kampung Sungai Kayu Ara.

Aset Sekat Kanal.

Aset Menara Pantau.

Aset Penimbunan Kanal.

Aset Ekowisata Mangrove.

Aset Penimbunan Kanal.

Aset Ekowisata Mangrove, berupa toilet.

Kegiatan pemeriksaan BMN juga dilanjutkan ke Kampung Harapan dan Kampung Sungai Limau yang merupakan desa intervensi dari mitra pelaksana Konsorsium Elang. Beberapa aset yang dilakukan pemeriksaan antara lain:

1. Sekat kanal di Sungai Limau dan Kampung Harapan.
2. Sumur bor.
3. Demonstration plot (demplot) penanaman bibit cabai merah, pinang, dan kopi liberika.
4. Papan petunjuk aset (plang).
5. Bibit tanaman hutan.

Aset Sekat Kanal di Kampung Harapan.

Aset Sekat Kanal kampung harapan.

Aset Papan Informasi kampung harapan.

Aset Papan Informasi kampung harapan.

Sumur Bor kampung harapan.

Sumur Bor kampung Harapan.

Aset Sumur Bor.

Aset Demplot Argoforestry.

Aset Bibit Kopi Liberika.

Aset Bibit Kopi.

Aset Alat Penyemprotan.

Foto bersama Masyarakat Peduli Api.

Sekat Kanal di kampung Sungai Limau,
kondisi kemarau air tdk ada disekitaran kanal.

Kondisi pinggiran sekat kanal ditumbuhi ilalang dan kering kerontang.

Pemeriksaan sekat kanal kedua, kondisi sama kering dan ditumbuhi ilalang.

Kondisi samping sekat kanal.

Sumur bor di desa Sungai Limau.

Sumur bor kedua.

Demplot Agroforestry di kampung sungai Limau.

Plang SOP EWS yang kedua di kampung sungai Limau.

Pemeriksaan BMN juga dilakukan pada mitra pelaksana PPLH – UNKRIP di Palangkaraya pada tanggal 20 September 2019. Kegiatan pemeriksaan dilakukan di Desa Katunjung dan didampingi oleh perwakilan dari PPLH – UNKRIP serta perwakilan MPA Katunjung. Pemeriksaan pertama dilakukan dengan uji coba langsung alat pompa air untuk sumur bor dan kelengkapan lainnya seperti selang pelontar, Nozzel, dan selang sepiral. Jumlah alat pompa sesuai dengan data yang dimiliki yaitu berjumlah 4 unit mesin pompa Robin. Pada saat pemeriksaan di Desa Katunjung, salah satu mesin sedang digunakan untuk kegiatan pemadaman api yang saat itu tengah terjadi.

Pemeriksaan sumur bor secara langsung juga dilakukan ke lokasi sumur bor nomor 51 dan 52. Tim BMN memastikan kondisi sumur bor dalam keadaan baik. Disamping itu, peninjauan sekat kanal juga dilakukan dengan menempuh jalur darat, mengingat kondisi kanal yang kering pada musim kemarau. Kondisi sekat kanal mengalami sedikit longsor akibat musim kemarau yang melanda daerah ini.

Berhenti sejenak melihat lahan yang bekas terbakar di pinggir jalan.

Tim mulai perjalanan menuju desa katunjung.

Sedang makan cemilan di atas speedboad. Sampahnya tidak dibuang ke sungai.

Pengecekan mesin robin, selang spiral, selang pelontar desa katunjung.

Mesin pompa Robin, selang spiral, selang pelontar.

Nozzle.

Pemeriksaan sumur bor di desa katunjung.

Perjalanan menuju sumur bor no. 52.

Sumur bor no. 52.

Berhenti karena air makin dangkal, tim melanjutkan perjalanan kaki menuju sekat kanal.

Tim memantau kondisi sekat kanal.

Kondisi sekat kanal saat ini.

Kemajuan Pelaksanaan Proyek Hibah ICCTF-UKCCU

Mitigasi Berbasis Lahan

1. Konsorsium RWWG

Kegiatan pemantauan bersama yang telah dilaksanakan Konsorsium RWWG dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) setempat menghasilkan komitmen Dinas Pariwisata untuk memberikan akses listrik ke kawasan dengan beberapa persyaratan berupa proposal pengajuan.

Secara garis besar proponen telah memenuhi target capaian, namun pada kegiatan R2 (revegetasi) luasan pembibitan tidak memenuhi target awal (60 Ha) namun hanya dilakukan di lahan seluas 32 Ha. Adapun jumlah bibit yang ditanam teteap sesuai target awal. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan antara rencana jenis tanaman yang akan ditanam dengan realisasi sebagai hasil proses padiatapa bersama masyarakat.

Dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, dilakukan perhitungan kajian hasil perhitungan emisi dan menunjukkan adanya penurunan emisi sebesar 71.967 ton CO2-eq atau 72%, dimana sumber penurunan emisi terbesar dari dekomposisi gambut dari pembuatan sekat kanal dan penanaman pohon.

Pemantauan program telah dilaksanakan pada tanggal 5-9 Agustus 2019 dengan melibatkan CIFOR. Terdapat 5 sekat kanal di sepanjang Jalan Sri Mesing, dengan jarak antar sekat kanal 500 meter. Kelima sekat kanal berfungsi dengan baik dan memiliki konstruksi yang baik. Berdasarkan peta KHG yang diterbitkan BRG, kawasan tersebut diperuntukkan sebagai kawasan lindung, namun hingga kini masih menjadi kawasan budidaya. Salah satu kunjungan ke sumur bor No 22 dengan kedalaman 30 meter, menunjukkan konstruksi yang baik, serta dapat berfungsi dengan baik untuk pemadaman api.

Untuk mendorong komitmen desa untuk menjaga keberlanjutan kegiatan restorasi dan pengelolaan gambut, Desa Parit I/II maupun Desa Sungai Kayu Ara mengalokasikan anggaran untuk operasional MPA sebesar 24 juta setahun, dimana terdapat 5 anggota dari masing-masing desa.

Terdapat beberapa kendala pelaksanaan, salah satunya demplot agroforestri bawang merah di Desa Sungai Kayu Ara yang sebagian mengalami gagal panen karena serangan hama. Sebelumnya telah dipasang alat telemetri di demplot tersebut, dan kini alat telah dipindahkan ke Desa Parit I/II untuk melihat apakah penggunaaan alat tersebut efektif digunakan mulai dari penanaman dilakukan. Saat ini kelompok tani masih beradaptasi dengan aplikasi RITx yang digunakan karena terdapat perubahan sistem.

Sekat Kanal 1 dengan lebar 5,15 meter di Desa Parit I/II (Jalan Sri Mesing).

Sekat Kanal 5 dengan lebar 5,15 meter. Kondisi kering pada musim kemarau.

Menara Pantau Api setinggi 13 meter.

Penimbunan Kanal 1 km dilakukan di bulan Maret 2019.

Embung di sepanjang penimbunan (100 meter).

Demplot bawang merah di Desa Sungai Kayu Ara.

2. Konsorsium Perkumpulan Elang

Secara keseluruhan, proponen telah memenuhi seluruh target capaian proyek. Terlebih lagi, terdapat 1 sekat kanal tambahan yang dibangun secara swadaya dengan mempertimbangkan kebutuhan desa. Namun demikian, berdasarkan hasil reviu ICCTF, terdapat beberapa laporan kegiatan yang perlu dilengkapi proponen, seperti kegiatan peningkatan kapasitas, sosialisasi dan lokakarya. Berdasarkan hasil kajian perhitungan emisi dari kegiatan yang telah dilakukan proponen, terdapat penurunen emisi sebesar 54.100 - 63.100 ton CO2-eq.

Salah satu demplot agroforestri di Desa Bunsur yang ditanam berbagai jenis tanaman seperti serai wangi, pinang bitara dan kopi liberika, saat ini terkendala musim kemarau sehingga minim ketersediaan air. Kekeringan tersebut juga berdampak pada keringnya kanal-kanal di Desa Bunsur. Berdasarkan tinjauan ke salah satu sekat kanal, kondisi konstruksi masih baik namun tidak ada air yang tertampung di bagian hulu sekat kanal.

Uji coba sumur bor menggunakan mesin sempat terkendala karena terdapat bagian dari komstruksi sumur yang hilang. Dari kedua sumur bor yang dilakukan uji coba, keduanya dapat mengeluarkan air namun belum bisa berfungsi optimal untuk pemadaman kebakaran. Sebagai tindak lanjut, masyarakat akan memperbaiki salah satu sumur bor dan dilakukan uji coba ulang yang terdokumentasi dan disampaikan ke ICCTF.

Kondisi Sekat Kanal di Desa Dosan kering di musim kemarau.

Sekat kanal di Desa Kayu Ara Permai tetap basah di musim kemarau.

MPA mengorpasikan sumur bor menggunakan mesin pompa.

Sumur bor dapat berfungsi dengan baik.

Sumur bor di Desa Kayu Ara Permai dapat mengeluarkan air namun tidak berfungsi secara optimal.

Demplot serai wangi dan kopi di Desa Dosan, serai wangi dan kopi tetap dapat hidup meskipun mengalami kondisi kekeringan.

3. Konsorsium Yayasan Mitra Insani

- Dokumen rencana aksi telah tersusun, namun belum sampai ke tahap pengesahan sehingga dibutuhkan komitmen dari proponen untuk terus mengawal proses hingga dokumen rencana aksi dapat disahkan di tingkat kabupaten/provinsi.
- Kegiatan revegetasi/pembibitan tanaman bernilai ekonomi tinggi ditargetkan dilakukan di lahan seluas 100 Ha sebanyak 28.000 bibit. Dalam pelaksanaannya, penanaman dilakukan di lahan seluas 70 Ha.
- Demplot pertanian tanpa bakar ditargetkan pada lahan seluas 14 Ha di 7 desa. Dalam pelaksanaannya, demplot tersebut secara keseluruhan seluas 6,75 Ha di 7 desa.
- Hasil perhitungan penurunan emisi total dari intervensi pembuaatan sekat kanal, penanaman bibit pohon rawa, penimbunan sekat dan pencegahan kebakaran sebesar 92,167 ton CO2-eq.

Papan informasi kegiatan Konsorsium Mitra Insani di Desa Tanjung Kuras.

Papan Informasi Sekat Kanal di Desa Tanjung Kuras.

Mengukur kedalaman gambut.

Sekat kanal di kanal tersier, Desa Tanjung Kuras.

Demplot tanaman TOGA di Desa Tanjung Kuras.

Kunjungan Tim ICCTF dan CIFOR ke demplot.

Bibit tanaman kayu di lahan revegetasi.

Rumah Bibit Kayu untuk menyimpan cadangan bibit jika diperlukan penyulaman.

Inovasi & Pengembangan Pertanian Pintar (*Smart Farming*) di Lahan Gambut

Pemasangan alat telemetri yang telah dilakukan di 2 desa intervensi ICCTF yaitu Desa Parit I/II (RWWG) dan Desa Lalang (YMI) mulai memberikan manfaat bagi petani di desa intervensi proyek. Petani dapat mulai memantau kondisi tanah dan iklim, sehingga dari rekomendasi pengelolaan lahan pertanian diharapkan dapat memberikan hasil panen yang optimal. Penanaman bawang sudah memasuki penanaman kedua dengan 150 kg bibit yang ditanam. Pada periode tanam pertama, petani terkendala banjir di bulan September. Namun demikian, masih terdapat 120 kg bawang merah yang bisa dipanen. Efektivitas penggunaan alat telemetri dapat dilihat setelah 65 hari masa tanam bawang merah. Alat telemetri juga yang telah dipasang di Desa Lalang, dimana saat ini memiliki komoditas utama jagung, setelah sebelumnya dilakukan penanaman terong. Berdasarkan keterangan masyarakat, hasil penjualan terong dapat mencapai 1,2 juta dengan harga terong Rp. 8000/kg.

Demplot bawang merah di Desa Parit I/II dipasang alat telemetri.

Demplot bawang merah di Desa Parit I/II seluas ½ hektar.

Demplot hortikultura di Desa Lalang.

Demplot cabai rawit di Desa Lalang mengalami kekeringan sehingga hasil kurang optimal.

Hasil Reviu Kelengkapan Dokumen Penutupan Proyek Mitra Pelaksana ICCTF-UKCCU

Mitra Pelaksana	Lokasi	Kemajuan
Konsorsium Mitra Insani	Riau	• Seluruh dokumen kelengkapan untuk penutupan proyek telah terpenuhi. • Telah dilaksanakan pemeriksaa BMN
Konsorsium RWWG	Riau	• Seluruh dokumen kelengkapan untuk penutupan proyek telah terpenuhi. • Telah dilaksanakan pemeriksaa BMN
Konsorsium Perkumpulan Elang	Riau	• Seluruh dokumen kelengkapan untuk penutupan proyek telah terpenuhi. • Telah dilaksanakan pemeriksaa BMN
P2KLH	Kalimantan Tengah	• Belum mengirimkan laporan bulanan dan laporan akhir proyek

Capaian Dalam Angka
Pendanaan UKCCU Batch II sampai dengan Kuartal III 2019

Studi Baseline Ekosistem Gambut	**5 dokumen**
Studi Baseline Kondisi Ekonomi	**5 dokumen**
Rencana Aksi Provinsi	**3 dokumen**
Studi Dampak Sosial Ekonomi di Ekosistem Gambut	**5 dokumen**
Studi Perhitungan Pengurangan Emisi Karbon	**5 dokumen**
Desa yang Menerapkan Prosedur Restorasi & *Rewetting*	**19 desa**
Sekat Kanal	**131 unit**
Sumur Bor	**538 unit**
Penimbunan Kanal	**9 km**

Tower Pemantauan Api	**6 unit**
Pohon ditanam	**133.750 bibit**
Revegatasi/Penanaman Kembali	**199 ha**
Demplot Agroforestri	**17 unit**
Kawasan Ekowisata	**2 lokasi**
Kelompok MPA terbentuk	**23 kelompok**
Diseminasi Pencegahan Kebakaran	**324 orang**
SOP Penangangan Kebakaran	**11 dokumen**
Early Warning System	**11 dokumen**
Jumlah Penerima Manfaat Langsung	**974 orang**
Jumlah Penerima Manfaat Tidak Langsung	**30.074 orang**

Kemajuan Pelaksanaan Program Hibah ICCTF-USAID

Mitigasi Berbasis Lahan

1. Lembaga Olah Hidup (LOH)

Pada bulan Juli 2019, LOH telah menyelesaikan proyek di tiga (3) desa di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan pada bulan Juli 2019, yaitu program pendampingan mengenai kebakaran hutan, pembuatan pupuk organik dan herbisida, pengembangan produk – produk makanan rumah tangga, serta pembuatan film dokumenter mengenai proyek.

Pembuatan film dokumenter dari program – program yang dikembangkan oleh LOH telah dilakukan sejak setahun yang lalu di tiga (3) desa yaitu desa Olat Rawa, desa Labuhan Kuris, dan desa Teluk Santong. Pada bulan Juli 2019, film dokumenter yang berjudul 'Berdamai dengan Badai' telah menyelesaikan proses pengeditan dan diproduksi sebanyak 250 CD untuk disebarkan kepada pemangku kepentingan dan komunitas lokal.

Hal yang perlu disorot pada tahun 2019 adalah HKm Ai Manis telah berkontribusi kepada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Proses ini ditunjukkan dengan penyerahan PBNP dari ketua HKm Ai Manis sebesar Rp 8.600.000,- melalui Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Batu Lanteh.

Dengan selesainya proyek LOH pada periode ini, semua kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keluaran yang ingin dicapai telah sukses dilaksanakan. Catatan penting untuk LOH adalah keberlanjutan dari hasil proyek terutama dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk menjaga dan mengelola keberlanjutan proyek.

Keluaran yang diproduksi oleh LOH dalam periode ini adalah:

- 1 lokakarya tentang kebakaran hutan.
- 1 lokakarya tentang pupuk organic dan herbisida.
- 1 lokakarya tentang produk makanan lokal.
- 1 film documenter berjudul "Berdamai dengan Badai" (diproduksi sebanyak 250 CD).
- PNBP sebesar Rp 8.600.000.

Tanaman di area rehabilitasi desa Lab. Kuris.

Salah satu dokumentasi proyek di koran lokal 'Radar Sumbawa' pada hari Kamis, 4 Juli 2019.

Film documenter berjudul “Berdamai dengan Badai” ditonton bersama – sama pada saat rapat evaluasi proyek.

Area rehabilitasi di desa Teluk Santong.

2. Universitas Tanjungpura (UNTAN)

Proyek UNTAN juga telah berakhir di periode ini, lebih tepatnya di bulan Juli 2019. Oleh sebab itu, laporan kuartal periode ini hanya membahas beberapa proyek yang tersisa dari rencana proyek UNTAN. Proyek – proyek tersebut adalah beberapa aktivitas yang diinisiasi oleh UNTAN di dalam Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) UNTAN yang terletak kabupaten Mempawah, Landak, dan Kubu Raya, seperti sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan kepada beragam pemangku kebijakan, program pendampingan untuk komunitas lokal tentang budidaya lebah Kelulut, biomassa berbasis Calliandra, air minum yang berasal dari air gambut, serta produksi video singkat tentang lahan gambut.

Sosialisasi mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan telah dilaksanakan oleh UNTAN di dalam acara “Bhakti Sosial Artha Graha Peduli dalam rangka HUT ke-61 KODAM XII/TANJUNGPURA” pada tanggal 15-20 Juli 2019. Acara ini dilaksanakan di Sambas yaitu di area perbatasan Indonesia-Malaysia, serta melibatkan beragam institusi untuk berpartisipasi, termasuk UNTAN.

Di kuartal ketiga tahun 2019, UNTAN juga telah melaksanakan program pendampingan untuk masyarakat lokal tentang Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti madu dari lebah Kelulut, Calliandra, dan air minum berasal dari air gambut, serta patroli pencegahan kebakaran hutan dan penebangan liar. Selain itu, produksi video singkat yang memperkenalkan lahan gambut telah selesai dengan total video sebanyak 11 video.

Dengan berakhirnya proyek UNTAN di bulan Juli 2019, UNTAN telah berhasil menyelesaikan seluruh program yang disusun untuk mencapai keluaran yang direncanakan. UNTAN bahkan telah berkolaborasi dengan pemangku kebijakan terkait dalam beberapa program. Poin penting yang harus digarisbawahi oleh UNTAN adalah keberlanjutan dari pengembangan HHBK oleh komunitas lokal dikarenakan belum tersedianya lokakarya terkait pengelolaan dan pengembangan bisnis, serta adanya resiko pola hidup masyarakat yang kembali ke produk kayu dari hutan.

Keluaran yang diproduksi oleh UNTAN dalam periode ini adalah:

- 1 program pendampingan tentang budidaya lebah Kelulut.
- 1 program pendampingan tentang tentang biomassa berbasis Calliandra.
- 1 program pendampingan tentang air minum berasal dari air gambut.
- 11 video singkat tentang lahan gambut.
- 8 tanda pencegahan kebakaran hutan.
- 1 acara kolaborasi berjudul, ‘Bhakti Sosial Artha Graha Peduli dalam rangka HUT ke-61 KODAM XII/ TANJUNGPURA’.

Pendampingan masyarakat atau komunitas lokal tentang budidaya Lebah Kelulut .

Salah satu tanda pencegahan kebakaran hutan di desa Kayu Ara.

Pasukan pemadam kebakaran hutan UNTAN mendemonstrasikan penanggulangan kebakaran hutan di acara 'Bhakti Sosial Artha Graha Peduli dalam rangka HUT ke-61 KODAM XII/TANJUNGPURA.

Mendampingi masyarakat lokal dalam pengelolaan air minum berbasis air gambut.

3. Yayasan Orang Utan Indonesia (Yayorin)

Periode kuartal ketiga menandai berakhirnya proyek Yayorin di kabupaten Kotawaringin Barat. Beberapa kegiatan yang terlaksana pada akhir proyek Yayorin adalah pelatihan tentang pengelolaan zona penyangga, memfasilitasi terbentuknya kebijakan konservasi ekosistem Nipah dan juga Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), serta penyelesaian dokumen analisis emisi karbon pada lokasi proyek.

Hingga akhir Juli 2019, Yayorin telah menyelenggarakan pelatihan untuk membangun kapasitas dari komunitas lokal dengan berkolaborasi bersama Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL), Dinas Kehutanan, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kotawaringin Barat. Terdapat total 8 pelatihan yang dilaksanakan oleh Yayorin hingga Juli 2019.

Selain itu, Yayorin juga telah memfasilitasi pembuatan Peraturan Desa dalam konservasi dan pengelolaan ekosistem Nipah, IUPHKm, dan Surat Pernyataan dari Bupati Kotawaringin Barat menyatakan bahwa bagian timur dari daerah penyangga hutan gambut di Suaka Margasatwa Sungai Lamandau merupakan area penyerap karbon di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain Surat Pernyataan Bupati, pengesahan dan ratifikasi Peraturan Desa dan IUPHKm masih berada dalam proses akhir.

Dalam periode ini, Yayorin telah menyelesaikan dokumen analisis emisi karbon pada lokasi proyek. Dokumen tersebut menyatakan bahwa proyek dari Yayorin telah menyimpan sebanyak 11.738 tCO_2e/ha carbon dari area seluas 5.087 ha yang telah mempraktekkan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB). Hasil ini telah disampaikan kepada pemangku kebijakan terkait yang kemudian mendorong implementasi dari PLTB di area lainnya.

Patroli pencegahan kebakaran hutan juga telah dilaksanakan beberapa kali untuk mendukung area yang telah mengikuti metode PLTB. Beberapa institusi yang terlibat di dalam patorli adalah BPBD Kotawaringin Barat, DAOPS III Manggala Api, dan MPA Tanjung Putri-Mendawai (MPA Cahaya Fajar).

Dengan berakhirnya proyek Yayorin bersama dengan ICCTF di kabupaten Kotawaringin Barat, penting diadakannya perbandingan antara keluaran yang ingin dicapai dengan keluaran aktual. Setelah dianalisis, Yayorin telah berhasil menjalankan keluaran aktual sesuai dengan rencana keluaran yang terlihat dari program rehabilitasi lahan blok hutan Sungai Teringin oleh HKm Tani Sejati Mendawai, kolaborasi dengan BPSKL, Dinas Kehutanan, dan KPHP West Kotawaringin di dalam program pendampingan, rancangan dokumen dari beberapa kebijakan, sebuah dokumen pengukuran karbon, implementasi dari PLTB dan pertanian presisi (smart farming), serta aktivitas yang melibatkan with pemangku kebijakan terkait dalam pencegahan kebakaran hutan.

Keluaran yang diproduksi oleh Yayorin dalam periode ini adalah:

- 1 desa baru mengadopsi PLTB.
- 8 pelatihan untuk peningkatan kapasitas HKm sampai dengan Juli 2019.
- 1 surat pernyataan dari Bupati Kotawaringin Barat dalam mendukung PLTB.
- 1 rancangan peraturan desa dalam konservasi dan pengelolaan ekosistem Nipah.
- 1 rancangan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) untuk 5 HKm.
- 1 dokumen tentang analisis karbon emisi di lokasi proyek.

Program pendampingan dalam mengelola bisnis pembudidayaan ikan kepada Kelompok Setia Kawan di Desa Tanjung Terantang.

Demplot padi Mina miliki HKm Mawar Bersemi di Desa Tanjung Terantang.

MPA Cahaya Fajar berkolaborasi dengan BPBD Kotawaringin Barat dalam apel regular pencegahan kebakaran hutan.

Patroli pencegahan kebakaran hutan oleh MPA Cahaya Fajar, DAOPS III Manggala Agini Pangkalan Bun, BPBD Kotawaringin Barat, dan TNI.

4. Yayasan Tiara Pusaka

Proyek ICCTF bersama dengan Yayasan Tiara Pusaka merupakan satu – satunya proyek yang masih berjalan di periode ketiga tahun 2019. Oleh karena itu, masih banyak program atau aktivitas yang dilakukan oleh Yayasan Tiara Pusaka di bulan Juli, Agustus, dan September 2019. Program – program tersebut adalah program pendampingan komunitas lokal oleh Yayasan Tiara Pusaka, program pendampingan komunitas lokal oleh para ahli, lokakarya tentang rehabiliitasi lahan di Pulau Saparua, sosialisasi dan pembuatan Koperasi Petani Organik, survey sosial-ekonomi tentang petani organik, dan perhitungan karbon emisi gas rumah kaca di Pulau Saparua.

Pada Juli 2019, Yayasan Tiara Pusaka menyelenggarakan program pendampingan dengan staff dari Yayasan Tiara Pusaka kepada kelompok Gihon di Desa Mahu, serta kelompok Waipatal, Lithos, dan Urupati dari Desa Haria. Program pendampingan dengan para ahli juga dilakukan setelahnya terhadap kelompok lokal yang sama. Meskipun ketika pelaksanaan program pendampingan banyak masyarakat yang telah memulai bahkan mendapatkan hasil dari pertanian organik, tinggi dan besarnya curah hujan menjadi halangan terbesar petani organik dalam mengolah lahannya.

Pada Agustus 2019, Yayasan Tiara Pusaka berfokus kepada penyelenggaraan lokakarya dalam penggunakan mulsa plastik dan irigasi tetes sederhana, manajemen bisnis koperasi, manajemen paska panen, dan distribusi produk ke pasar modern. Workshop ini menggandeng beragam ahli dan pemangku kebijakan seperti Sekolah Pertanian Pembangunan Maluku, Dinas Ketahanan Pangan Maluku, serta Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Tengah. Selain itu, program lain yang terlaksana dalam bulan Agustus 2019 adalah program pendampingan tentang pertanian organik, pembuatan Koperasi Petani Organik, survey sosial-ekonomi tentang petani organik, dan perhitungan karbon emisi gas rumah kaca di Pulau Saparua.

Hal lain yang perlu disoroti adalah meskipun bulan September 2019 seharusnya termasuk ke dalam periode kuartal ketiga tahun 2019, Yayasan Tiara Pusaka belum menyerahkan laporan bulanannya

dikarenakan adanya gempa yang terjadi secara terus menerus di lokasi proyek. Aksi lanjutan dari ICCTF akan dilaksanakan terkait dengan situasi ini.

Keluaran yang diproduksi oleh Yayasan Tiara Pusaka dalam periode ini adalah:

- 3 program pendampingan tentang pertanian organik.
- 1 lokakarya dalam penggunakan mulsa plastik dan irigasi tetes sederhana, manajemen bisnis koperasi, manajemen paska panen, dan distribusi produk ke pasar modern.
- 1 'Koperasi' Petani Organik.
- 1 survey sosial-ekonomi tentang petani organik.
- 1 perhitungan karbon emisi gas rumah kaca di Pulau Saparua.

Mengunjungi salah satu lahan petani organik di Desa Mahu.

Para petani organik menghadiri lokakarya dalam penggunakan mulsa plastik dan irigasi tetes sederhana, manajemen bisnis koperasi, manajemen paska panen, dan distribusi produk ke pasar modern.

Pembuatan Koperasi Pertanian Organik.

Perhitungan emisi karbon gas rumah kaca di Pulau Saparua.

Adaptasi & Ketahanan

5. Departemen Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada (FTP UGM)

Pada periode kuarta ketiga tahun 2019, FTP UGM telah menyelesaikan proyek mereka di Kabupaten Sumba, Nusa Tenggara TImur. Dua program yang dilaksanakan oleh FTP UGM pada akhir proyeknya adalah pelatihan perhitungan emisi karbon gas rumah kaca dan pembuatan buku panduan implementasi metode System of Rice Intensification (SRI).

Pelatihan perhitungan emisi karbon rumah kaca dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2019 dan mengundang Dr. Aini dari Fakultas Teknik Sipil, Universitas Islam Indonesia. Diskusi dalam pelatihan ini terfokus kepada perbandingan emisi karbon gas rumah kaca yang dihasilkan dalam pengolahan padi secara konvensional dan dengan metode SRI. Hasilnya adalah metode SRI memiliki angka emisi yang lebih kecil yaitu 0,209077 kg CO_2-eq/kg yield dibanding metode konvensional yang menghasilkan angka emisi sebesar 1,36893 kg CO_2-eq/kg yield.

Selain daripada itu, FTP UGM juga telah membuat buku panduan pelaksanaan metode SRI pada bulan Juli 2019. Buku ini telah disebarkan dan diinformasikan kepada petani dan pemerintah daerah. Buku ini juga melengkapi buku sebelumnya mengenai prediksi iklim di Sumba Timur yang telah lebih dahulu dibagikan kepada petani dan pemerintah daerah.

Dengan berakhirnya proyek FTP UGM pada bulan Juli 2019, beberapa poin yang perlu disoroti dari keluaran mereka adalah metode SRI telah berhasil diimplementasi di lokasi proyek dan meningkatkan produktivitas lahan pada demplot. Pendampingan dari FTP UGM dan penyuluh pertanian tentang penggunaan metode SRI dan pembuatan pupuk organik juga telah berhasil diberikan kepada petani.

Keluaran yang diproduksi oleh FTP UGM dalam periode ini adalah:

- 1 pelatihan perhitungan emisi karbon gas rumah kaca antara metode konvensional dan SRI dalam pengolahan padi.
- 1 buku panduan pengembangan budidaya padi dengan metode SRI.

Metode Konvensional		
CH_4	0,97799	kg $CO_{2\text{-eq}}$/kg yield
N_2O	0,3701	kg $CO_{2\text{-eq}}$/kg yield
CO_2	0,02083	kg $CO_{2\text{-eq}}$/kg yield
TOTAL	1,36893	kg $CO_{2\text{-eq}}$/kg yield

Metode SRI		
CH_4	0.156636	kg $CO_{2\text{-eq}}$/kg yield
N_2O	0.045108	kg $CO_{2\text{-eq}}$/kg yield
CO_2	0.007333	kg $CO_{2\text{-eq}}$/kg yield
TOTAL	0.209077	kg $CO_{2\text{-eq}}$/kg yield

Pelatihan perhitungan emisi karbon gas rumah kaca antara metode konvensional dan SRI dalam pengolahan padi.

Buku panduan pengembangan budidaya padi dengan metode SRI.

6. Yayasan Terangi

Yayasan Terangi telah menyelesaikan proyeknya bersama ICCTF pada periode kuartal ketiga tahun 2019, yaitu pada bulan Juli 2019. Hanya terdapat dua (2) program yang telah disusun dan dilaksanakan oleh Yayasan Terangi pada bulan Juli 2019, yaitu pengembangan strategi adaptasi dan pengembangan kapasitas masyrakat lokal dalam bidang penyelaman. Dalam mengembangkan strategi adaptasi perubahan iklim, Yayasan Terangi dan masyarakat lokel dari Kota Bitung dan Pulau Lembeh telah mengembangkan beberapa kajian. Kajian – kajian ini meliputi kajian tentang analisa kerentanan adaptasi perubahan iklim, model spasial kerentanan perubahan iklim, serta kelentingan terumbu karang dan dukungan pariwisata. Selain dari kajian tersebut, dokumen mengenai strategi pembangunan lokal dan referensi lain juga digunakan dalam pengembangan strategi adaptasi perubahan iklim.

Program lain yang terlaksana adalah pengembangan kapasitas dari komunitas lokal yang diselenggarakan oleh Yayasan Tiara Pusaka. Berkolaborasi dengan POSSI Kota BItung, Yayasan Terangi menyusun dan menyelenggarakan sebuah pelatihan penyelaman bagi masyarakat lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata. Pelatihan ini ditujuan kepada masyarakat yang nantinya akan menjadi pemandu wisata penyelaman dikarenakan tingginya permintaan lokasi penyelaman di Pulau Lembeh, Pantai Kahona, dan Pantai Kareko.

Yayasan Terangi menyelesaikan proyeknya di Juli 2019. Oleh sebab itu, diperlukan adanya peninjauan keluaran yang dihasilkan dengan rencana keluaran dari Yayasan Terangi. Dari hasil peninjauan, terlihat bahwa Yayasan Terangi telah berhasil mencapai semua keluaran yang direncanakan. Yayasan Terangi telah menyelesaikan dokumen tentang kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim, kelentingan terumbu karang, serta strategi adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim. Program pengembangan kapasitas masyarakat lokal juga telah terselenggara seperti adanya Sekolah Pantai Indonesia dan lokakarya serta pelatihan terkait ekowisata.

Keluaran yang diproduksi oleh FTP UGM dalam periode ini adalah:

- 1 dokumen analisa kerentanan dalam perubahan iklim.
- 1 dokumen penilaian spasial terhadap kerentanan perubahan iklim.
- 1 dokumen kelentingan terumbu karang dan dukungan pariwisata.
- 1 pelatihan penyelaman para pemandu selam untuk mendukung pariwisata.

Dokumen Kajian Kelentingan Terumbu Karang Pulau Lembeh.

Pelatih Penyelam memberikan arahan dan pengajaran mengenai keterampilan menyelang untuk kegiatan wisata pada lokakarya untuk masyarakat lokal.

Pelatih dan peserta lokakarya melakukan praktik langsung teknik menyelam.

Capaian Dalam Angka

Pendanaan USAID Batch III sampai dengan Kuartal III 2019

Output	FTP	LOH	Terangi	UNTAN	Yayorin	YTP	TOTAL
Area baru bebas bakar/terintegrasi oleh praktek PLTB (unit)					1		**1**
Film		1		11			**12**
Lokakarya atau program pendampingan terkait kebakaran hutan, pertanian organik, pengembangan HHBK	1	3	1	3	8	4	**20**
Tanda pencegahan kebakaran hutan				8			**8**
Acara kolaborasi dengan pemangku kebijakan lainnya				1			**1**
Surat pernyataan Bupati					1		**1**
Dokumen Hasil Program terkait Karbon Emisi, Sosial Ekonomi, Adaptasi Perubahan Iklim, dan Pertanian	1		3		1	2	**7**
Koperasi						1	**1**

Strategi Keberlanjutan

Proyek ICCTF-UKCCU

1. ICCTF mendorong Pemerintah Desa di wilayah intervensi berkomitmen mengalokasikan Anggaran Dana Desa untuk melanjutkan kegiatan restorasi dan pengelolaan gambut yang telah dilakukan, termasuk melalui pemeliharaan infrastruktur restorasi yang sudah terbangun dan operasional MPA. Pada tahun 2019, terdapat beberapa desa yang telah mengalokasikan anggaran dana desa untuk operasional MPA senilai 10-32 juta per tahun.
2. Mendorong Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk melakukan *scaling-up* dan replikasi kegiatan yang dinilai berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat tanpa merusak kualitas lingkungan, seperti penerapan kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), pemanfaatan lahan gambut untuk tanaman hortikultura (agroforestri) dan pengembangan kawasan ekowisata.
3. Mendorong adanya sinergi dan kolaborasi multipihak di tingkat pusat dan daerah, termasuk apparat keamanan untuk meningkatkan efektivitas implementasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
4. Penyusunan kajian dan evaluasi penerapan pertanian presisi (*smart farming*) di lahan gambut.

Proyek ICCTF-USAID

1. Perlunya regulasi untuk mengatur pengandangan ternak besar di tingkat kabupaten diiringi dengan produksi pakan ternak dan program bantuan.
2. Kajian risiko terhadap perubahan iklim dan kelentingan terumbu karang menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan termasuk Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan penanganan kebencanaan di tingkat daerah.
3. Mengembangkan inovasi pengolahan air gambut menjadi air minum untuk memperkuat usaha BUMDes dan peningkatan kesehatan masyarakat.
4. Mengoordinasikan penerapan pertanian presisi 4.0 di tingkat kecamatan.
5. Pengarusutamaan kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) di lahan gambut ke dalam kegiatan prioritas Dinas Pertanian di daerah yang memiliki lahan gambut.
6. Penyebarluasan penggunaan mulsa untuk budidaya hortikultura ke daerah rentan di kawasan timur Indonesia untuk adaptasi terhadap perubahan iklim.

Kelompok Kerja Energi 2

Pokja II-Energi ICCTF telah melakukan beberapa kegiatan pada periode Juli-September 2019 (Triwulan II). Sebagian besar dari kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan yang mulai dilaksanakan pada TW I. Berikut hasil pelaksanaan kegiatan pada Pokja II-Energi ICCTF periode TW II antara lain:

Tindak Lanjut Kerja Sama dengan European Investment Bank (EIB)

Tindak lanjut kerja sama dengan EIB sudah memasuki tahap penyusunan dan penyiapan proposal pendanaan. Pokja II-Energi telah melakukan pertemuan dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dan Pertamina Geothermal Energy (PGE) untuk membahas daftar proyek energi terbarukan yang akan diusulkan untuk mendapatkan pendanaan pada tahap pertama.

a) BNI sedang menyiapkan 2 (dua) proyek energi terbarukan berbasis hydro, salah satunya yaitu Pembangkit Listrik Mikrohidro (PLTM) Jayamukti (2 x 1,15 MW).
b) PGE akan segera menyampaikan daftar proyek PLT Panas Bumi yang akan akan diusulkan untuk tahap I. Adapun proyek panas bumi yang akan diusulkan merupakan proyek pembangkit skala kecil (small scale).

Technical Assistance Penguatan Kualitas Dokumen Studi Kelayakan PLT Sampah di Luwuk, Sulawesi Tengah

Pokja II-Energi bekerja sama dengan Green Growth Global Institute (GGGI) memberikan bantuan pendampingan teknis (technical assistance) kepada pengembang Kaltimex Energy untuk penguatan kualitas dokumen studi kelayakan PLT Sampah di Luwuk, Sulawesi Tengah. Pendampingan teknis ini dilakukan melalui reviu terhadap dokumen studi kelayakan serta survei lokasi pembangunan PLT Sampah di Luwuk, Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun Tim POKJA Energi ICCTF bersama dengan perwakilan GGGI dan Kaltimex Energy telah melakukan kunjungan ke Luwuk pada bulan Agustus 2019. Tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk melakukan pengumpulan data dan meninjau langsung lokasi pembangunan PLT Sampah. Hasil dari kunjungan tersebut antara lain:

a) Lokasi pembangunan PLT Sampah Luwuk berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bungah. TPA Bungah dibangun pada tahun 2016 dengan luas mencapai 3 ha. Saat ini timbunan sampah di TPA Bungah mencapai 15 meter. Setiap harinya sampah yang masuk ±35 ton/hari (70 persen sampah organik dan 30 persen sampah anorganik).
b) TPA Bungah belum memiliki teknologi untuk pengolahan air limbah dari timbunan sampah. Air limbah hanya dibiarkan saja dalam kolam terbuka. Jika hujan atau air limbah dalam kolam tersebut penuh, maka air limbah akan mengalir ke pesisir Pantai Luwuk dan berpotensi mencemari daerah sekitar pesisir pantai. Sebelum pembangunan PLT Sampah dilakukan, diharapkan permasalahan pengelolaan air limbah ditangani terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Kaltimex Energy.
c) Reviu dokumen studi kelayakan ditargetkan selesai pada bulan Desember 2019. Selanjutnya, pembangunan PLT Sampah ditargetkan akan dimulai pada awal tahun 2020.

Menghadiri P4G (*Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030*) di UN Global Compact, Newyork, Amerika Serikat

Indonesia merupakan salah satu negara yang baru bergabung pada P4G. P4G merupakan inisiatif baru yang dimulai pada tahun 2018 dan bertujuan menjadi forum terkemuka dunia dalam mengembangkan kemitraan publik-swasta yang konkret dalam skala besar. P4G juga bertujuan membantu mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Perjanjian Iklim Paris (Paris Agreement).
P4G menyediakan bantuan pendanaan untuk kerja sama (partnership) pada proyek dalam fase start-up dan scale-up. Pada tahun 2020, agenda kerja P4G akan berfokus pada pembentukan co-create partnership. Co-create partnership tersebut dilaksanakan melalui tiga prioritas P4G tahun 2020, yaitu: (a) perumusan solusi; (b) mobilisasi aktor kunci; (c) pertukaran pengetahuan dan pembelajaran. Prioritas kegiatan P4G tahun 2020 yang meliputi Renewable Energy Finance, Zero Emission Transport, Food Loss and Market, New Plastics Market, Sustainable Infrastructure, serta Innovative Financing and Business Models.

Pertemuan P4G dalam UN Global Compact bulan September 2019, delegasi Pemerintah Indonesia menyampaikan beberapa point berikut:

a) Indonesia mendukung sepenuhnya agenda kerja P4G. Kementerian PPN/Bappenas akan menjadi focal point P4G di Indonesia;
b) Sebagai anggota baru P4G, Indonesia merasa beruntung dan berterima kasih telah memperoleh kesempatan untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan kerja sama yang lebih konkrit antara sektor publik dan swasta dalam rangka pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan Paris Agreement di Indonesia.
c) Pemerintah Indonesia perlu menentukan tema prioritas yang akan dimasukkan dalam agenda kerja P4G sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Indonesia.
d) Pemerintah Indonesia perlu menyusun terobosan untuk mengakselerasi kerja sama sektor publik dan swasta dalam pencapaian prioritas nasional.
e) Pemerintah Indonesia perlu mendorong dukungan dari instansi pemerintah dalam mendukung dan mengimplementasikan P4G Partnership di Indonesia.

Penyusunan Kajian Pemetaan Potensi Hutan Energi untuk Biomassa di Indonesia

Penyusunan Kajian Pemetaan Potensi Hutan Energi untuk biomassa di Indonesia oleh POKJA Energi ICCTF sudah dimulai sejak bulan Juli 2019. Dalam pelaksanaanya, POKJA Energi ICCTF dibantu oleh tim konsultan. Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah memetakan potensi pengembangan hutan energi untuk bahan baku biomassa di Indonesia dengan memfokuskan pada 2 (dua) lokasi terpilih. Berikut kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan kajian tersebut:

a) Pada bulan Juli 2019 dilakukan kick-off meeting bertempat di Hotel Rancamaya Bogor untuk menyepakati ruang lingkup kegiatan kajian. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa kajian akan difokuskan pada pemetaan potensi hutan energi untuk bahan baku biomassa padat dengan orientasi

pemakaian dalam negeri. Pemetaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor seperti ketersediaan lahan untuk hutan energi, jenis dan mekanisme budidaya tanaman hutan energi, ketersediaan infrastruktur pendukung, dukungan regulasi dan perijinan, nilai keekonomian biomassa, serta mekanisme kelembagaan dan tata niaga.

b) Pada bulan Agustus 2019 dilakukan Focus Group Discussion (FGD) lanjutan penyusunan kajian. Acara ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data awal untuk penyusunan laporan awal kajian. FGD dilakukan di Hotel Rancamaya Bogor dengan menghadirkan narsumber dari Kementerian ESDM, Kementerian LHK, dan CIFOR Indonesia. Melalui pertemuan tersebut, telah didapatkan beberapa data sekunder seperti peta sebaran hutan energi di Indonesia, peta sebaran potensi biomassa di Indonesia, sebaran PLT Biomassa dan rencana pembangunan di Indonesia, serta penelitian dan kajian terdahulu terkait pengembangan hutan energi di Indonesia. Laporan Awal dan Laporan Antara pelaksanaan kajian sudah selesai disusun pada awal bulan September 2019.

c) Pada bulan Oktober 2019 telah dilakukan FGD Pemilihan Lokasi Prioritas untuk Pemetaan Potensi Hutan Energi. FGD dilaksanakan di Hotel Neo Sentul, Bogor dengan menghadirkan narasumber dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian LHK, serta Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI). Berdasarkan hasil analisis dan scoring yang dilakukan oleh Tim Konsultan serta hasil pembahasan rapat, diputuskan bahwa lokasi prioritas untuk pemetaan kajian akan dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Dalam FGD ini juga diperoleh data sekunder mengenai jenis tanaman hutan energi, serta mekanisme budidaya tanaman hutan energi yang cocok di Indonesia.

d) Dalam rangka pengumpulan data dan informasi, Pokja II-Energi dan Tim Konsultan juga melakukan kunjungan dan wawancara mendalam ke beberapa instansi. Pada bulan September 2019, kunjungan dan wawancara mendalam dilakukan ke sejumlah unit kerja di Kementerian ESDM seperti Direktorat Jenderal Energi, Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, serta Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

Penyusunan Dokumen *Pre-Feasibility Study* (Pre-FS) Proyek Energi Terbarukan

Penyusunan dokumen Pre-Feasibility Study Proyek Energi Terbarukan merupakan salah satu kegiatan utama POKJA Energi ICCTF. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 dengan melibatkan jasa konsultan pihak ketiga. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menyiapkan dokumen perencanaan proyek-proyek energi terbarukan yang siap untuk mendapatkan dukungan pendanaan. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen Pre-FS tersebut antara lain:

a) Kick-Off Meeting kegiatan penyusunan dokumen Pre-Feasibility Study Proyek Energi di Hotel Rancamaya

Bogor. Dalam pertemuan tersebut disepakati ruang lingkup kegiatan penyusunan Pre-FS yaitu meliputi reviu, identifikasi dan pemilihan lokasi prioritas untuk kegiatan penyusunan Pre-FS Proyek Energi Terbarukan, pengumpulan data dan informasi, analisis studi kelayakan, serta koordinasi dengan intansi terkait terutama Pemerintah Daerah yang akan menjadi lokasi terpilih. Tindak lanjut rapat tersebut adalah agar dilakukan pertemuan dengan pihak USADI-ICED II perihal pembahasan Data Peta Indikatif Daerah (Perbedaan Zona Hijau dan Zona Merah) Proyek Energi Terbarukan dan Data Potensi Desa 2018 sebagai salah satu metodologi penentuan lokasi Penyusunan Pre-FS Proyek Energi Terbarukan.

b) Kunjungan Kerja ke Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara dalam rangka koordinasi dan pengumpulan data awal untuk penyusunan dokumen Pre-FS proyek energi terbarukan. Dalam kunjungan tersebut, Bappeda mengusulkan agar lokasi Pre-FS terpilih terlebih dahulu akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk melihat daerah yang paling siap ketersediaan datanya. Selain itu, juga akan mempertimbangkan hasil analisis lokasi berdasarkan kriteria yang telah dibuat oleh tim konsultan. Sementara Dinas ESDM mengusulkan agar penyusunan dokumen Pre-FS dilakukan di Pulau Nias atau Pulau Berhala. Hal ini dilakukan mengingat rasio elektrifikasi Pulau Nias masih kecil, sementara potensi pariwisatanya cukup besar.

c) Kunjungan kerja ke Kantor Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kantor Dinas ESDM Provinsi NTT dilakukan juga dalam rangka koordinasi dan pengumpulan data awal untuk penyusunan dokumen Pre-FS proyek energi terbarukan. Dalam kunjungan tersebut, Bappeda menyampaikan bahwa kabupaten yang rasio elektrifikasi masih rendah antara lain

Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Akan tetapi, Bappeda berkomitmen mendukung penyusunan dokumen Pre-FS dimanapun lokasinya di Provinsi NTT. Bappeda juga akan menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk membantu pengumpulan data. Demikian halnya Dinas ESDM juga menyampaikan dukungannya dalam penyusunan dokumen Pre-FS di Provinsi NTT. Akan tetapi Dinas ESDM masih kesulitan untuk mengumpulkan data mengingat lokasi-lokasi cukup tersebar di masing-masing pulau. Dinas ESDM juga menmbahkan bahwa satu kabupaten yang rasio elektrifikasi cukup rendah yaitu Kabupaten Manggarai Timur.

d) Rapat koordinasi kemajuan Penyusunan Pre-FS Proyek Energi Terbarukan dilaksanakan di Hotel Sheraton Bandung, selain bertujuan untuk mendapatkan informasi kemajuan pencapaian kegiatan Penyusunan Pre-FS Proyek Energi Terbarukan khususnya perihal pemilihan lokasi study proyek, rapat ini juga dalam rangka perkenalan sekaligus meminta arahan dari Bapak Yahya Rachmana Hidayat selaku Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan yang baru dilantik pada bulan September 2019 untuk menggantikan Bapak J. Rizal Primana yang promosi menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas.

Pembangunan PLT Surya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi

Pembagunan PLT Surya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi merupakan kerja sama antara POKJA Energi ICCTF, MCC Indonesia, dan Shizen Energy Jepang. Saat ini kerja ini tersebut telah memasuki tahap perencanaan konstruksi. Shizen Energy Jepang bekerja sama dengan PT Puriver Indonesia sebagai pengembang lokal dalam menyusun rencana dan timeline pelaksanaan proyek.

Kelompok Kerja Kelautan & Perikanan 3

COREMAP-CTI

1. Steering Committee Meeting COREMAP – CTI WB

Steering Committee (SC) Meeting COREMAP – CTI World Bank ini bertujuan untuk membahas Progres Restrukturisasi COREMAP – CTI, Progres oleh masing-masing Project Implementing Unit dan Rencana tindak lanjut. SC Meeting dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2019 di Hotel DoubleTree by Hilton, Jakarta dan dihadiri oleh Pak Gellwynn Jusuf (Sestama Bappenas), Pak Subandi (Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas), Pak Zainal Arifin (Deputi Ilmu Pengetahuan Kebumian LIPI), Pak Brahmantya Satyamurti (Dirjen PRL KKP), Pak Agus Dermawan (Sesdit PRL KKP), Ibu Sri Yanti (Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas), Pak Guspika (Kepala Pusdiklatren Bappenas), Pak Dirhamsyah (Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI), Pak Tonny Wagey (Team Leader Pokja III ICCTF), Staff Direktorat Kelautan dan Perikanan Bappenas, Staff P2O LIPI, Staff KKP, Staff DJPB Kemenkeu dan Staff Pokja III ICCTF.

Hasil dari pelaksanaan SC Meeting COREMAP – CTI World Bank yaitu memuat executive decisions dan rekomendasi terkait pelaksanaan proyek COREMAP – CTI World Bank. Adapun tindak lanjut atas pelaksanaan SC Meeting yaitu pelaksanaan terhadap keputusan-keputusan dan rekomendasi terhadap implementasi program COREMAP – CTI World Bank. Selain itu, progres setiap kegiatan kedepannya diharapkan selalu dilaporkan dalam setiap pelaksanaan SC Meeting yang meliputi variabel penyerapan, serta capaian terhadap target.

2. Modalitas Implementasi COREMAP – CTI WB

Berdasarkan Aide Memoire Implementation Support Mission February 2019, modalitas implementasi dilakukan melalui sub grant kepada entitas yang diatur dalam PMK 168/2015 dan revisi PMK 173/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah. Pelaksanaannya kemudian diatur dalam suatu Pedoman Umum oleh PA K/L terkait, dan didetailkan dalam sub grant manual. Dalam kegiatan Diskusi Sub Grant Manual tanggal 15 Juni 2019 di Jakarta, dan 18 Juni 2019 di Bogor, muncul kekhawatiran apabila penyusunan Pedoman Umum tersebut dilakukan oleh PA Kementerian PPN/ Bappenas, hal tersebut berarti mengabsahkan pemberian bantuan pemerintah oleh Kementerian PPN/

Bappenas, sedangkan pemberian Bantuan Pemerintah yang in-line dengan tupoksi Bappenas selaku instansi perencanaan belum dapat didefinisikan dengan jelas.

Mempertimbangkan poin di atas, modalitas implementasi pada draft sub grant manual dirancang melalui mekanisme hibah yang diswakelolakan kepada Lembaga/ Institusi dan LSM yang kompeten (sesuai Peraturan LKPP Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola), dan merupakan mekanisme penyaluran yang biasa dilakukan oleh ICCTF. Dalam preliminary comments terhadap draft sub grant manual dari Bank Dunia, disampaikan bahwa modalitas implementasi tidak sesuai dengan apa yang disepakati dengan Bank sebelumnya. Kegiatan ini dicantumkan di bawah kategori pencairan Block Grant pada GA, dimana karakteristiknya diatur bawah PMK 168/2015 revisi PMK 173/2016. Bank Dunia menyampaikan akan melakukan kajian kembali terhadap pemahaman konsep swakelola tipe 2 & 3. Sebagai tindak lanjut, Direktorat Kelautan dan Perikanan Bappenas mengirimkan Nota Dinas Permohonan Legal Opinion terkait modalitas implementasi ini kepada Biro Renortala, Biro Hukum dan IBAU pada tanggal 08 Juli 2019.

Pada tanggal 16 Juli 2019 dilakukan pembahasan Modalitas Implementasi untuk Proyek COREMAP – CTI World Bank yang dihadiri oleh Kasubdit Tata Kelola Laut dan Pesisir, Team Leader Pokja III ICCTF, Kemenkeu, Biro Hukum Bappenas, Bagian Verifikasi dan Anggaran Bappenas, Direktorat Multilateral Bappenas, PPK Program PPN XIV, dan Staff lainnya. Pembahasan yang dilakukan merekomendasikan agar ICCTF akan menyusun kajian viabilitas penggunaan Perpres 80/2011 sebagai Pedoman Umum pelaksanaan Bantuan Pemenrintah, serta melakukan identifikasi kegiatan Bantuan Pemerintah pada proyek COREMAP – CTI yang masuk ke dalam kategori sesuai PMK 168 revisi PMK 173 untuk pendaftaran kodefikasi akun di anggaran nantinya. Selain itu, dukungan pelaksanaan COREMAP – CTI untuk mendukung tusi Bappenas. Selain itu, ICCTF diharapkan akan melakukan roadshow konsultasi kepada unit-unit terkait (Biro Hukum, Biro Renortala, IBAU, Direktorat PH Kemenkeu, DJA, dan Direktorat Permukiman selaku implementator PAMSIMAS) untuk masukan tambahan mendukung kajian pada poin sebelumnya.

3. Persiapan Pelaksanaan Proyek COREMAP – CTI

Dalam rangka persiapan pelaksanaan proyek, Tim Pokja III ICCTF melakukan penyempurnaan terhadap konsep Pedoman Tata Kelola Hibah. Dengan asistensi dari Tenaga Ahli dari pihak donor World Bank, telah dilaksanakan beberapa pertemuan guna menjaring masukan dan mengidentifikasi gap pada konsep pedoman yang saat ini dimiliki. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi pelaksana proyek dan calon mitra pelaksana sebagai sumber informasi meliputi segala aspek proyek, yaitu Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan, Penyelesaian serta tata laksana administrasi proyek.

Pelaksanaan Proyek COREMAP – CTI sangat memerlukan persiapan yang matang. Dalam konteks sosialisasi serta menghimpun masukan – masukan substansial untuk menjawab tujuan daripada proyek COREMAP – CTI baik World Bank (WB) maupun Asian Development Bank (ADB), maka pertemuan/ kunjungan ini diselenggarakan. Kegiatan ini dilakukan dari tanggal 30 Juli – 1 Agustus 2019 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini terdiri dari pertemuan dengan pihak-pihak terkait di Kantor BKKPN Kupang dan Kunjungan Lapangan ke Kabupaten Kupang.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi gambaran umum proyek COREMAP – CTI WB dan ADB, membahas secara detail kegiatan COREMAP – CTI WB dan ADB, serta membahasa hal-hal berkembang lainnya. Pertemuan yang dilakukan di Kantor BKKPN Kupang, dihadiri oleh Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Kasubdit Tata Kelola Laut dan Pesisir Bappenas, Kasubdit KKHL KKP, Kabag Program Setditjen PRL KKP, Kepala BKKPN Kupang, SKIPM Kupang, PSDKP Kupang, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTT, Team Leader Pokja III ICCTF, Staff Pokja III – ICCTF, Staff Direktorat Kelautan dan Perikanan Bappenas, Staff BKKPN Kupang, Politeknik KP Kupang, Perwakilan Universitas Cendana Kupang dan NGO.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini didapatkan beberapa masukan yang diperoleh khususnya terkait dengan detail kegiatan yang sudah dimasukkan ke dalam logical framework, kesesuaian lokasi calon penerima manfaat proyek, HPS, dan breakdown beberapa kegiatan yang dinilai masih relevan. Informasi detail yang didapatkan dari hasil konsultasi dan kordinasi ini, selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan TOR untuk setiap paket kegiatan. Disamping itu juga beberapa masukan yang diperoleh akan diadopsi sebagai referensi dalam mekanisme pelaksanaan call for proposal.

Keberadaan COREMAP – CTI dalam membangun atau bahkan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem terumbu karang sangat penting untuk adopsi ke tingkat pendidkan formal. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan memasukan materi penyadartahuan akan pentingnya menjaga pesisir dan ekosistem terumbu karang ke dalam mata pelajaran muatan lokal di tingkatan SD, SMP atau bahkan SMA. Teknisnya, kegiatan ini bisa dijalankan dengan menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa sekolah di sekitar lokasi pelaksanaan proyek. Sebagai langkah tindak lanjut ke depan, perlu dipersiapkan waktu agar dapat melakukan audiensi dengan pemerintah Provinsi NTB dan Bali, khususnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan COREMAP – CTI ADB.

4. Ekspose COREMAP – CTI dan Konsorsium Riset Samudera

Melanjutkan upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas melaksanakan kegiatan COREMAP – CTI dengan target utama yaitu "Penguatan kapasitas kelembagaan dalam monitoring ekosistem pesisir dan penelitian untuk menghasilkan data berbasis informasi pengelolaan sumber daya, dan meningkatkan efektifitas pengelolaan ekosistem pesisir yang prioritas". LIPI akan fokus terhadap aspek penguatan kapasitas kelembagaan dalam monitoring ekosistem pesisir dan penelitian untuk menghasilkan data berbasis informasi pengelolaan sumber daya, dan Bappenas melalui satuan kerja (Satker) Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) akan fokus terhadap peningkatan efektifitas pengelolaan ekosistem pesisir yang prioritas.

Lokasi pelaksanaan proyek COREMAP – CTI meliputi 39 situs, yang berlokasi di 7 kota dan 38 kabupaten di 16 provinsi. 16 dari 39 situs tersebut adalan Kawasan Konservasi Perairan baik di level nasional maupun daerah, yaitu TWP Kapoposang, SAP Kepulauan Aru Tenggara, TWP Laut Banda, TWP Padaido, TWP Gili Matra, TWP Kepulauan Anambas, and TWP Kepulauan Pieh, TNP Kepulauan Seribu, Taman Pesisir Derawan, Taman Nasional Pulau Komodo, TWP Pulau Moyo, dan Taman Nasional Taka Bonerate, SAP Waigeo Sebelah Barat, SAP Raja ampat, TNP Laut Sawu, dan KKPD Kep. Raja Ampat.

Pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 telah diselenggarakan acara Ekspos COREMAP – CTI dan Konsorsium Riset Samudera (KRS) di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta. Mengusung tema “Our Action for Healthy Coral and Better Ocean”, Ekspose COREMAP – CTI dan KRS bertujuan untuk menjadi wadah memperkenalkan COREMAP – CTI dan KRS kepada pemangku kepentingan terkait serta masyarakat luas, serta menjaring masukan substansial terkait pengelolaan kawasan pesisir dan samudera. Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya pembangunan kelautan yang kuat, terstruktur, dan komprehensif.

Kegiatan Ekspos COREMAP-CTI dan KRS dibuka dengan sambutan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Sekretaris Utama Bappenas selaku Ketua Steering Committee COREMAP-CTI yang dilanjutkan dengan dua keynote speech oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan. Kemudian diselenggarakan sesi talkshow Bersama (1) Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, (2) Deputi Bidang Ilmu Kebumian LIPI, (3) Deputi

IV Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Kemaritiman, dan (4) Dekan Fakultas Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Acara ini diakhiri dengan penutupan oleh Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/ Bappenas.

5. Update Financial Assessment COREMAP – CTI ADB

Proses financial assessment yang dilakukan oleh ADB salah satunya adalah dengan melakukan review terhadap dokumen kuisioner yang telah disiapkan oleh ADB. Melalui proses ini dapat dinilai risiko yang kemungkinan akan muncul khususnya berkaitan dengan aspek finansial sesuai dengan tingkat dan proses mitigasinya. Beberapa risiko yang dimaksudkan menyangkut tentang proses disburshment yang akan dilakukan oleh proponent (NGO), prosedur pencairan dana (flow of fund and payment request) dengan mempertimbangkan exchange rate, nilai kontrak kerja, hingga personalia yang akan melaksanakan proyek.

Input dalam bentuk lampiran dan jawaban atas kuisioner yang ditetapkan ADB telah disampaikan oleh ICCTF. Selanjutnya, laporan atas hasil financial assessment ini tengah disusun oleh pihak ADB yang nantinya dapat menjadi salah satu referensi dalam menjalankan proyek COREMAP, secara khusus untuk aspek finasial.

Blended Finance

1. Pembahasan *Blended Finance* dengan PT. SMI

Inisiasi Institusi Pendanaan Kelautan dan Perikanan (IPKP) merupakan upaya untuk mendukung pengembangan potensi kelautan dan perikanan melalui skema pendanaan bauran (blended finance) yang pendanaannya dapat bersumber dari publik, swasta, internasional dan filantropi. Di dalam skema IPKP ini dibutuhkan host entity yang nantinya akan menerima dan menyalurkan dana pinjaman kepada Pemerintah Daerah (two-step loans). Untuk menemukan calon host entity tersebut maka Tim Bappenas kemudian melakukan audiensi pada beberapa lembaga keuangan Bank dan Non Bank di pusat.

Pada tanggal 1 Juli 2019, Tim Bappenas pertama kali berdiskusi dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pada pertemuan tersebut, perwakilan PT. SMI dihadiri oleh Bapak Darwin Trisna Djajawinata, selaku Project Development and Advisory Director PT. SMI beserta staf. Berdasarkan hasil diskusi, PT. SMI memiliki kemampuan dan pengalaman dalam hal penyaluran pendanaan infrastruktur yang sifatnya berkelanjutan. PT. SMI juga pada dasarnya bersedia menjadi bagian dalam inisasi IPKP. Dengan hasil yang positif tersebut, komunikasi antara Bappenas dan PT. SMI terus berlanjut baik secara formal maupun informal. Di dalam proses penjajakan, tidak lepas peran serta Valeria Ramundo Orlando, selaku Vice President Blended Finance RARE dan tim yang beberapa kali mengunjungi Indonesia untuk melakukan pertemuan tindak lanjut dengan pihak PT. SMI dan Bappenas.

Pada tanggal 15 Agustus 2019, juga dilakukan pertemuan dengan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan, Bapak Luky Alfirman,

sebagai salah satu bentuk dukungan Kementerian Keuangan terhadap kerjasama antara Bappenas dengan PT. SMI di dalam inisiasi blended finance.

Pada pertemuan tanggal 4 September 2019 disepakatilah bahwa akan dilakukan penandatanganan Surat Pernyataan Minat (Letter of Intent) antara Direktur Utama PT. SMI dengan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas. PT. SMI akan berfungsi sebagai inkubator inovasi pendanaan di sektor kelautan dan perikanan yang kemudian akan disalurkan kepada Pemerintah Daerah. Penandatanganan kerjasama rencananya akan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Konferensi Tahunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), tanggal 9 Oktober 2019.

2. *Blended Finance Data Collection* di Kendari

Pada 11-13 September 2019 dilaksanakan Blended Finance Data Collection di Kendari oleh Team Leader dan Konsultan Blended Finance Pokja III ICCTF. Pada kegiatan ini dilaksanakan tiga pertemuan yaitu dengan Bapak Ruslan selaku Kepala Bidang Makro Bappeda Sulawesi Tenggara, Bapak Ashkabul selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Ibu Waode Mushlihatun selaku Kasubid Pendanaan dan Pembiayaan Bappeda Sulawesi Tenggara.

Pertemuan dengan Bapak Ruslan dilakukan di ruangan kerja beliau di Kantor Bappeda Sulawesi Tenggara, ditemani oleh Bapak Ridwan dari RARE.

Hasil diskusi yang didapatkan yaitu aspek utama yang menjadi skala prioritas Pemda Sulawesi Tenggara adalah Infratruktur, seperti; Jalan, Bidang Kesehatan (Rumah Sakit), dan Bidang Pendidikan (Perpustakaan). Pendapatan terbesar Pemda Sulawesi Tenggara berasal dari restribusi Pertambangan dan Pajak Kendaraan Bermotor. Sektor perikanan menjadi sektor berikutnya yang akan dikembangkan. Rencana tersebut dimasukan dalam RPMD 2019-2024.

Pertemuan dengan Bapak Ashkabul dilakukan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil diskusi antara lain potensi sumber daya belum maksimal dikembangkan, lalu budget di DKP sekitar 5% dari total anggaran. Bapak Ashkabul mengatakan potensi hambatan masyarakat dari daerah lain yang mengambil ikan dengan perlengkapan modern ke wilayah konversi. Hal ini menjadi dilema karena selama di Indonesia semua wilayah NKRI.

Pertemuan dengan Ibu Waode Mushlihatun dilakukan di Kantor Bappeda Sulawesi Tenggara. Ibu Waode mengatakan potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Tenggara sangat besar oleh sebab itu Pemda mendorong terbangunnya sektor ini. Pendapatan Provinsi dari sektor perikanan berasal dari Restibusi perizinan usaha perikanan.

3. *Round Table FGD Meeting Blended Finance*, Jakarta

Kegiatan Round Table FGD Meeting Blended Finance Kelautan dan Perikanan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2019 di Hotel Morissey Jakarta dan dihadiri oleh Pak Gellwyn Jusuf selaku Staff Khusus Menteri Bappenas, Kasubdit Tata Kelola Laut dan Pesisir PPN/ Bappenas, Team Leader Pokja III ICCTF, Deputi ADB, Project Director PT SMI, OJK, Vice President RARE Arlington, Vice President RARE Indonesi, Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Staff Direktorat Kelautan dan Perikanan Bappenas, Staff Pokja III ICCTF, dan Staff RARE Indonesia.

Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Bapak Syaid Sadiansyah selaku Deputi ADB, Bapak Darwin selaku Project Director PT SMI, dan Bapak Gellwynn Jusuf selaku Staff Khusus Menteri PPN/ Bappenas. Selanjutnya dilakukan paparan oleh Bapak Taufik Alimi dan Valeria selaku Vice President RARE serta paparan oleh Bapak Tonny Wagey selaku Team Leader Pokja III ICCTF dan Ibu Isti selaku Perwakilan OJK. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara juga ikut serta dalam memberikan paparan serta diskusi. Kegiatan ini dilaksanakan dari pukul 09.00 s/d 17.00.

Blue Carbon

1. Keikutsertaan di Australia

Setelah kegiatan technical scoping meeting yang berlangsung pada tanggal 14-15 Februari 2019 lalu di Bali, kerjasama antara ICCTF-Bappenas dengan DOEE (Department of the Environment and Energy) Pemerintah Australia dan CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) dilanjutkan dengan keikutsertaan dalam program Indonesia – Australia Blue Carbon Fellowship pada tanggal 9-29 Juni 2019 di Australia. Rangkaian kegiatan dilaksanakan di beberapa kota, yaitu Perth, Shark Bay, Stradebroke Island, Adelide, dan Canberra.

Pelatihan ini dihadiri oleh sembilan orang dari tujuh instansi pemerintah Indonesia, antara lain: 1) Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Bappenas; 2) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; 3) Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 6) Badan Informasi Geospasial; dan 7) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Adapun perwakilan Bappenas diwakili oleh Rahma Tri Benita dari Direktorat Kelautan dan Perikanan.

Selama kurang lebih 3 minggu, para peserta mengikuti rangkaian aktivitas dalam bentuk perkuliahan, praktek lapangan, dan analisis laboratorium. Perkuliahan mencakup pengenalan 1) bioekologi dan jasa

ekosistem mangrove dan lamun terutama dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan kerangka karbon biru, 2) keberlanjutan karbon biru yang didukung upaya restorasi ekosistem pesisir, 3) pemahaman mengenai regulasi dan ekonomi dalam kerangka karbon biru (Carbon market/finansial), serta 4) kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengurangan emisi gas rumah kaca dan upaya mitigasi perubahan iklim dengan mekanisme karbon biru. Selanjutnya adalah kegiatan praktek di lapangan berupa pengenalan ekosistem lamun dan mangrove di Australia, pengukuran kualitas perairan fisika dan kimia perairan dengan berbagai instrument seperti ADP dan mini CTD. Kegiatan lapangan lainnya adalah pengambilan sampel sedimen di ekosistem lamun dan mangrove, serta pengukuran laju sedimentasi di mangrove dengan Sea Elevation Table. Terakhir adalah kegiatan analisa di laboratorium yang dilakukan untuk menganalisa sampel sedimen tanah di ekosistem lamun, mangrove, dan salt marsh dengan menggunakan pendekatan metode MIR (Mid-Infrared) dan LECO CN Analyser.

2. Keikutsertaan dalam Pembukaan *2nd* ASEAN *Workshop on Carbon Sink and Sequestration in Coastal Ecosystem from Science to Policy*, Jakarta

Acara workshop ini dilaksanakan pada tanggal 2 – 5 September 2019 dengan salah satu topik bahasan yaitu blue carbon monitoring and modelling. Metode remote sensing dapat digunakan untuk melakukan pemantauan terhadap lamun, mangrove, dan bathymetric menggunakan pemetaan tiga dimensi. Teknik echo sounding dan acoustic propeller untuk mengatasi keterbatasan aplikasi penginderaan jarak jauh dan keterbatasan saat melalukan pemetaan tutupan lamun ketika sinar matahari tidak memadai.

Tutupan lamun di Indonesia berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh LIPI menunjukan 293,464 – 875,967 ha yang didominasi spesies Thalassia hemprichi, dan Enhalus acoroides dengan potensi serapan karbon diangka 1.9 – 5.8 Mt C/ tahun. Potensi ini bisa mengalami penuruan akibat dari aktivitas reklamasi, deforestasi, overfishing, dan juga polusi. Ke depan Indonesia akan merancang health index lamun, pemetaan lamun secara nasional, riset blue carbon dan green house gas inventory yang akan dikolaborasikan dengan universitas, kementerian teknis terkait, dan mitra pembangunan lainnya.

3. Pembahasan *Blue Carbon* dengan Perwakilan Australia

Pada tanggal 5 September 2019, perwailan DOEE Pemerintah Australia, Zoe Sinclair dan Alina Pahor, mengunjungi kantor Pokja III ICCTF untuk berdiskusi mengenai perkembangan program blue carbon di Indonesia. Pertemuan ini juga bertujuan untuk membahas project plan kerjasama bilateral Australia – Indonesia, serta mendapatkan feedback dan saran dari ICCTF-Bapppenas, terutama terkait kebijakan.

Secara garis besar, didapatkan kesimpulan bahwa diperlukaan beberapa kegiatan untuk mendukung pengembangan kebijakan blue carbon di Indonesia meliputi: 1) Pembentukan sekretariat nasional blue carbon; 2) Pelatihan blue carbon untuk pembuat kebijakan; 3) kunjungan lapangan; dan 4) National blue carbon summit yang diadakan oleh Indonesia.

ICCTF-Bappenas menyarankan agar kerangka kerja program blue carbon di Indonesia tidak hanya mempertimbangkan mitigasi dan adaptasi tetapi juga melakukan pendekatan terhadap livelihood. Kegiatan yang akan dilakukan juga diharapkan agar dapat sejalan dengan program-program prioritas di dalam RPJMN.

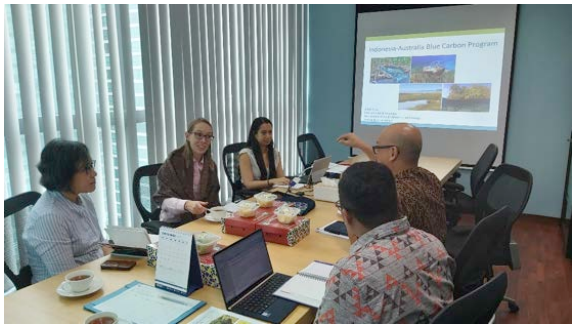

KESEKRETARIATAN

1. *Workshop & Lesson Learned* Mekanisme Pencairan Dana Hibah Luar Negeri Proyek PLN Pokja III ICCTF

Pada tanggal 8-10 Agustus 2019 telah dilaksanakan kegiatan Workshop & Lesson Learned Mekanisme Pencairan Dana Hibah Luar Negeri Proyek PLN Pokja III ICCTF. Kegiatan ini dilaksanakan atas rekomendasi hasil pertemuan pada tanggal 23 Juli 2019 perihal Mekanisme Pendanaan COREMAP – CTI WB. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala KPPN KPH DJPB Kemenkeu, Kasubdit Tata Kelola Laut dan Pesisir Bappenas, Kepala Bagian Verifikasi dan Anggaran Bappenas beserta staff, Kepala Bagian Keuangan Bappenas beserta staff, Team Leader Pokja III ICCTF, Bendahara Pengeluaran Anggaran Bappenas, PPK Program PPN III Bappenas, PPK Program PPN XIV beserta staff, Sekretariat ICCTF, Staff Direktorat Kelautan dan Perikanan, dan Staff Pokja III ICCTF.

Kegiatan dibuka oleh Kasubdit Tata Kelola Laut dan Pesisir kemudian dilanjutkan dengan paparan oleh Pak Siswandi selaku Kepala Bagian Verifikasi dan Anggaran Bappenas. Pak Siswandi memaparkan regulasi, mekanisme pengajuan tagihan, hal-hal yang perlu diperhatikan, pendaftaran kontrak, dan norma penyelesaian tagihan. Setelah itu dilanjutkan paparan oleh Pak Aa Gunawan selaku Kepala KPPN KPH DJPB Kemenkeu. Pak Aa Gunawan menjelaskan prinsip dan tata cara penarikan PHLN serta memaparkan terkait rekening khusus PHLN. Pada kegiatan ini juga dilakukan pemaparan oleh Ibu Titin selaku Kepala Bagian Keuangan Bappenas dan perwakilan PPK Program PPN III Bappenas.

2. Rapat Usulan UKE I dan UKE II

Pada hari Senin tanggal 2 September 2019 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Usulan Anggaran Tahun 2020 untuk UKE I dan UKE II di Alana Hotel, Sentul Bogor. Rapat dihadiri UKE I Kedeputian Kemaritiman dan Sumber Daya Alam dengan format working group dipimpin oleh Bapak Oktorika selaku Kepala Bagian Anggaran Biro Rencana, Organisasi dan Tata Leksana (Renortala). Selanjutnya pokok pembahasan yaitu mengenai usulan anggaran terkait SBM, Beban Kerja, serta perpindahan anggaran COREMAP-CTI dari Satker Bappenas ke Satker ICCTF.

Secara garis besar, usulan anggaran yang diajukan oleh UKE I dan UKE II di Kedeputian Kemaritiman dan Sumber Daya Alam sudah sesuai dengan RENSTRA dan RENJA Bappenas. Proses selanjutnya adalah updating data pada KRISNA dan penginputan pada RKAKL yang akan dilaksanakan pada beberapa minggu mendatang.

3. Pembahasan *Roadmap* SDGs 14

Pada hari Kamis sampai Jumat di tanggal 5-6 September 2019 telah diadakan pertemuan dalam kegiatan pembahasan roadmap SDG 14 di Hotel 1O1 Bogor. Dalam level presiden, yang disampaikan dalam pidatonya adalah agregat nasional (sama persis dengan yang sudah dibuat, tetapi ditambah keterangan bahwa grafik tersebut tidak bisa dijadikan acuan karena data sebenarnya sangat beragam). Sedangkan dalam level kementerian perlu di detailkan per WPP. Diagram yang sebelumnya telah disajikan tetap dipakai dengan menambahkan beberapa asteriks di dalamnya.

Asterisk yang ditampilkan adalah data agregat untuk spesies ikan komersial diseluruh WPP. Asterisk "Agregate for main commercial spesies at all FMA. Detail management measures should be considered and will be implemented by species by FMA (WPP)". Yang sudah dicadangkan dan dideklarasikan oleh provinsi akan segera dipercepat penetapannya melaui keputusan Menteri KKP. Kegiatan di Bali pada bulan November akan menyusun RAN terhadap 2 indikator SDGs 14. Untuk persiapan bahan plenary pada Selasa 8 Oktober sesi siang parallel 1 termasuk draft TOR, undangan kepada speaker (memperhatikan engagement daerah) adalah sebagai berikut :

a. Pak Augey, Pak Tony, Bu Wati (ekosistem laut/blue carbon)
b. Pak Yonvitner, Pak Arwan (sumber pangan laut)
c. Pak Ario Damar (pencemaran laut)
d. Bu Ummy, Pak Mubarik, Pak Lucy (ekonomi laut)

4. Pembahasan SOP, Laporan dan Rencana Kerja Pokja III ICCTF

ada hari Rabu-Kamis tanggal 18-19 September 2019 telah diadakan rapat konsinyering pembahasan SOP, laporan dan rencana kerja Pokja III ICCTF. Kegiatan ini dihadiri oleh Kasubdit Tata Kelola Laut dan Pesisir Bappenas, Team Leader Pokja III ICCTF, PPK Program PPN XIV, Staff PPK Satker ICCTF, Sekretariat ICCTF, Staff Direktorat Kelautan dan Perikanan Bappenas, dan Staff Pokja III ICCTF. Kegiatan pertemuan ini membahas tentang SOP Administrasi, Keuangan dan Program oleh Sekretariat ICCTF, diksusi laporan dan rencana kerja Pokja III ICCTF.

Pembahasan SOP Administrasi berdasarkan pembahasan pada level III, yaitu SOP Existing Sekretariat ICCTF Program, SOP Existing Sekretariat ICCTF Administrasi, SOP Existing Sekretariat ICCTF Keuangan dan Akuntansi, dan SOP Existing Sekretariat Keuangan dan Proyek. SOP Pokja III ICCTF diarahkan untuk mengacu pada SOP dari Sekretariat ICCTF serta diperbolehkan untuk menambah SOP yang lebih baik, namun SOP yang dibuat disarankan harus seimbang antara rijit dan fleksibilitas serta tidak disarankan memperberat user. ICCTF pada tahun 2020 akan lebih difokuskan 80% kepada Pokja III ICCTF.

5. Update Kerjasama dengan USAID

Sebagai tindak lanjut dari kemungkinan kerjasama antara Direktorat Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/ Bappenas dengan pihak USAID, telah dilaksanakan beberapa pertemuan yang bertujuan untuk mematangkan rencana kerjasama dalam bidang perikanan, khususnya mengenai pengelolaan sumber daya perikanan di laut Arafura.

Sebelum dilaksanakan kerjasama ini ada masalah yang harus diatasi yaitu bagaimana mengukur kapasitas penangkapan yang tepat melalui pengembangan model simulasi yang sesuai yang merupakan penerapan metodologi penilaian stok. Dalam praktiknya, kesulitan penilaian stok sebagian besar terkait dengan kesulitan untuk menemukan data yang baik dan valid untuk dianalisis di samping untuk menetapkan metode penilaian stok yang tepat. Oleh karena itu ada kebutuhan untuk mengembangkan metode penyediaan informasi yang tepat waktu yang penting bagi pembuat keputusan untuk mengelola perikanan secara berkelanjutan. Selain itu, pengetahuan tentang status dan tren perikanan, tidak hanya dalam hal sumber daya perikanan tetapi aspek sosial ekonomi, adalah kunci untuk pembuatan kebijakan dan manajemen yang bertanggung jawab. Selain itu, bagaimana menghasilkan pemaksimalan dari sewa sumber daya pun menjadi pertanyaan ekonomi utama tentang pengelolaan perikanan.

Dari beberapa pertemuan dengan pembahasan terkait hal-hal di atas, USAID tertarik untuk membantu dalam bentuk bantuan technical assistant untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam bentuk studi atau kajian mengenai bioeconomics analysis sumber daya perikanan di laut Arafura. Adapun tujuan analisa ini adalah : (1) Menentukan ukuran kinerja industri udang Laut Arafura menggunakan data survei biologi dan ekonomi untuk menilai pengelolaan perikanan udang saat ini; (2) Menilai masalah biologis dan ekonomi saat ini dalam perikanan udang melalui survei terhadap pukat sebagai cara untuk memberikan indikasi lebih lanjut tentang kendala pada profitabilitas di perikanan; (3) Menganalisis pengaturan manajemen alternatif melalui adopsi kebijakan yang berlaku untuk perikanan udang. Kegiatan ini direncanakan akan dimulai pada awal tahun 2020, dengan jangka waktu selama 1,5 tahun.

6. Penginputan RKAKL

Input pemuktahiran KRISNA Renja Tahun 2020 Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan pada tanggal 19-21 September 2019 di Hotel Aston Imperium, Purwokerto. Acara dipimpin oleh Bapak Kahmal Junaedi selaku Kepala Subbagian Anggaran, Bapak Oktorika selaku Kepala Bagian Program dan Anggaran serta Bapak Edison selaku Sisdur. Acara dihadiri oleh seluruh PPK Satker Bappenas, PPK Satker ICCTF dan PPK Satker KNKS, serta staff dari masing-masing PPK dan perwakilan dari UKE I dan II termasuk dari Pokja III ICCTF.

Pada pembukaan acara Pak Kahmal menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk melakukan pemuktahiran data anggaran tahun 2020 UKE I dan II ditingkat Kementerian PPN/ Bappenas, input dilakukan berdasarkan hasil penetapan alokasi anggaran 2020 yang sudah ditetapkan oleh Sesmen Bappenas. Pada saat melakukan input data dipastikan kembali kesesuaian Output dan anggaran sesuai dengan usulan dari unit kerja. Untuk pengadaan belanja modal dan sewa ruang kerja akan dilaksanakan oleh Biro Umum Bappenas, oleh sebab itu unit kerja memindahkan alokasi anggaransewa ruang kerja ke Biro Umum. Usulan penambahan anggaran tahun 2020 akan ditampung oleh Biro Renortala, sedangkan penetapannya akan diputuskan pada awal tahun 2020.

Untuk alokasi anggaran PHLN sesuai dengan Trilateral Meeting terakhir antara Bappenas, Kemenkeu dan Satker, diharapkan pada tahun 2020 apabila akan melakukan revisi penambahan atau atau pengurangan Pagu Hibah sebaiknya kelengkapan dokumen sudah disiapkan dari awal tahun, Setelah unit kerja melakukan input pemuktahiran alokasi anggaran 2020 pada aplikasi KRISNA diharapkan Sisdur akan approved pada minggu depan sehingga bila terbit RKA-KL sudah sesuai dengan usulan dari unit kerja.

7. Pembahasan Satker ICCTF

Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) merupakan program strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi perairan serta mendukung upaya penanganan dampak perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan. Dalam Agreement antara Pemerintah Indonesia dengan World Bank yang ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2019, ICCTF tertera sebagai unit pelaksana/ implementing unit yang bertugas melaksanakan porsi proyek hibah, sesuai dengan Amendment to Amended and Restated Loan Agreement; Amendment to the GEF Grant Agreement Loan No. 8336-ID and GEF Grant No. TF015470 pada Section 7.A. Institutional Arrangement, dengan Direktur Kelautan dan Perikanan selaku koordinator PIU ICCTF-BAPPENAS.

Sehubungan dengan temuan BPK terhadap pengelolaan Hibah ICCTF Tahun 2013-2016 terkait ketidaksesuaian keberadaan ICCTF dengan tugas dan fungsi Bappenas, hal ini sudah diclearkan kepada BPK dengan menyebutkan posisi ICCTF sebagai pilot project dalam menjawab tantangan pembangunan. Selain itu, ICCTF digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Nasional yang juga merupakan tusi Bappenas.

Pelaksanaan mekanisme trust fund di ICCTF merupakan strategi pemerintah dalam mengisi kekosongan fungsi inovasi pembangunan untuk menjawab tantangan ke depan dan ICCTF dapat menladi model inovasi pembangunan untuk pelayanan masyarakat.

Salah saru tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas adalah perencanaan melalui pendekatan evidence-based policy, baik dengan pembelajaran langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, COREMAP-CTI di bawah ICCTF merupakan evidence yang dirancang khusus sebagai pilot project bagi inovasi pembangunan terutama terhadap pengelolaan kawasan pesisir dan pulau kecil. Hal ini sesual dengan upaya peran Kementerian PPN/Bappenas meniadi perencanaan, penganggaran, pengendalian, serta memiliki peran enabler dalam melakukan inovasi kebijakan dan pembuatan model pembangunan.
Arahan dan Tindak lanjut:

a. Terkait proyek COREMAP-CTI dibawah satker ICCTF, Bapak IInspektur Utama memberikan clearance dan merekomendasikan agar sistem KRISNA dibuka untuk kegiatan tersebut.
b. Ke depan, disarankan Direktur Kelautan dan Perikanan dapat menyusun strategi bagaimana proyek ini dapat direplikasi dan bersifat berkelanjutan (sustainable), dan melibatkan K/L dalam pelaksanaan kegiatan.
c. Dalam jangka menengah, perlu dipertimbangkan penambahan klausul dalam Perpres/ Keppres terkait trust fund dalam tusi Bappenas, dan penguatan business process menuiu Trilateral Meeting.
d. Dalam jangka panjang, ICCTF dapat dipertimbangkan menjadi SDGs trust fund sehingga implementasi proyek-proyek di dalamnya menjadi lebih sinergis dalam menopang tujuan pembangunan berkelanjutan.

Komunikasi, *Outreach* & Kemitraan

1. Peresmian Batik Meru Betiri oleh Menteri PPN/ Bappenas (Pokja I)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, meresmikan batik tulis Jember khas Meru Betiri pada 31 Juli 2019 di halaman depan Gedung Rektorat Universitas Jember. Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), bekerja sama dengan Universitas Jember turut memberdayakan Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo sebagai Pusat Batik Warna Alam Taman Nasional Meru Betiri (TNMB). Dengan pendanaan dari USAID, sejak tahun 2017 hingga 2018, ICCTF telah menyalurkan pendanaan untuk program “Pengelolaan Area Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri Melalui Pembangunan Desain Plot Demonstrasi Menggunakan Penutupan Vegetasi Keberlanjutan”.

Tak hanya berhasil dalam melakukan rehabilitasi dan meningkatkan produktivitas kawasan Taman Nasional Meru Betiri, program ini juga berhasil memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan klaster ekonomi kreatif berbasis pengetahuan dan potensi alam. Salah satu hasil inovatif dari klaster ekonomi masyarakat tersebut adalah Batik Meru Betiri, yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Wonoasri, dengan mengkombinasikan corak batik khas Meru Betiri dengan pewarna yang berasal dari alam misalnya daun jati, biji pohon joho lawe, daun tanaman putri malu, hingga kulit kayu pohon jambal.

Pemberdayaan masyarakat sekitar TNMB ini turut meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, manajemen, permodalan dan akses kepada pasar sekaligus memanfaatkan kekayaan alam TNMB. Penggunaan pewarna alam berasal dari akar dan batang tanaman mangrove, daun jati dan tumbuhan putri malu dan sebagainya. Terdapat 13 motif batik yang bersumber dari kekayaan hayati TNMB baik flora maupun flora misalnya motif samber elang, lembah padmosari, jejak matul, siput meru, botol cabe, rekahan rafflesia, pucuk cabe jawa, kuncup cabe, kepak elang, tapak asri, lebah meru, hingga alas meru. Sejak awal 2018 sudah terbentuk berbagai Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang memanfaatkan kekayaan alam TNMB mulai dari KUBE Batik Warna Alam, minuman herbal hingga camilan khas Desa Wonoasri.

Program rehabilitasi kawasan hutan lindung ini turut mendukung target penurunan emisi di Provinsi Jawa Timur bidang Kehutanan tahun 2013-2020 adalah sebesar 6.221.572 ton CO2eq (Pergub Jawa Timur No 67 tahun 2012). Dengan diresmikannya Desa Wonoasri sebagai Pusat Batik Meru Betiri maka masyarakat terutama kelompok usaha dan kelompok perempuan dilibatkan dalam pelestarian alam sekaligus memberi akses pemberdayaan ekonomi.

Rektor Universitas Jember Drs. Moh. Hasan, M.Sc, Ph.D menjelaskan awalnya Program rehabilitasi TNMB ini dilaksanakan dalam enam sub program di antaranya penanaman tanaman ekonomi non kayu, peningkatan kesuburan dan daya sangga tanah, penilaian ekologi kawasan rehabilitasi, pembuatan hutan kolong dan pekarangan, perumusan kerjasama baru antara Tanam Nasional Meru Betiri dengan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo sebagai daerah penyangga TNMB. Fakta menunjukan bahwa banyak warga Desa Wonoasri yang merantau dan menjadi buruh migran. Dengan mempertimbangkan aspek perkembangan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta memperhatikan lingkungan dalam perkembangannya para peneliti Universitas Jember memfasilitasi kelompok pembatik Kehati yang beranggotakan 46 orang untuk mendapatkan pelatihan membatik dengan pewarna alam yang berasal dari TNMB.

Bambang Brodjonegoro menyampaikan harapannya bahwa apa yang dilakukan Bappenas, ICCTF, USAID dan Universitas Jember dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat, dapat menjadi langkah awal dan contoh yang baik, yang dapat menginspirasi bagi pihak-pihak lain untuk melakukan replikasi. Arah pembangunan Indonesia tentunya harus seiring dengan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dimana pembangunan memperhitungan pertumbuhan ekonomi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan kelestarian alam sehingga pembangunan terlaksana secara berkelanjutan.

Cerita dari Penerima Manfaat

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, tim ICCTF berkesempatan untuk berdialog dengan Ketua KUBE Batik Desa Wonoasri, Supmini Wardani. Peningkatan kapasitas untuk warga Desa Wonoasri memang diupayakan berkeadilan, ketika laki-laki dilatih membudidayakan tanaman untuk dikembangkan di Taman Nasional Meru Betiri, perempuan dilatih pula untuk mengolah hasil alam Taman Nasional Meru Betiri.

Tahun 2018 Supmini bersama sekitar 50 warga Desa Wonoasri mengikuti pelatihan membatik yang diorganisir oleh tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Universitas Jember, “mayoritas warga yang mengikuti pelatihan membatik adalah perempuan, ada 3 laki-laki yang terlibat dalam proses pewarnaan batik,” kenang Supmini. Seiring dengan berkembangnya produksi batik warna alam Meru Betiri Supmini dipercaya sebagai ketua, “awalnya saya hanya berpikir yang terpenting adalah ilmunya. Perlu ketelatenan, mereka yang masih bertahan membatik tentunya karena punya kemampuan dan kemauan yang kuat,” ujarnya.

Tantangan terbesar untuk mempertahankan Batik Warna Alam Meru Betiri adalah biaya kerja yang cukup tinggi sehingga harga jual batik warna alam juga cenderung tinggi. “Mayoritas buruh tani di sini mendapatkan penghasilan Rp50.000-Rp60.000 dalam sehari, sedangkan utuk membatik proses kerjanya panjang dan butuh detail saat pembuatan ornamen atau isen-isen,” jelas Supmini yang juga merupakan perancang batik pewarna alam Meru Betiri.

Konsistensi warna yang dihasilkan dari pewarna alam juga berbeda dengan pewarna sintetik, “Misalnya pewarnaan dari batang mahoni atau indigovera, semakin lama direndam akan menghasilkan warna yang pekat tergantung dengan bahan penguncinya. Warna alam terlihat seperti memudar, seperti kain gombalan (kain lama), tapi karena keunikan warna itu akhirnya batik warna alam punya pasar sendiri, penjualan memang masih terbatas di pameran Universitas Jember serta kami mulai menjual via sosial media,” jelas Supmini. Selain berdialog membahas KUBE Batik Warna Alam tim ICCTF juga bertemu dengan Ketua KUBE Jamu,

Rustini. Sebelumnya Rustini telah mengikuti sosialisasi mengenai perubahan iklim yang diadakan ICCTF di Desa Curahnongko, Tempurejo, Jember, "kebiasaan masyarakat sebelumnya tidak baik seperti menebang kayu, membakar padi dan sampah seenaknya, kemudian dampaknya kepada kesehatan, ada yang akhirnya mengidap Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)". "Saya berusaha menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan kepada ibu-ibu lansia, saya sudah usul agar melakukan penghijauan, saat itu ibu-ibu lansia belum dilibatkan, kemudian ada kesempatan, ICCTF masuk ke penanaman yang berkesinambungan, misalnya menanam cabe jawa kemudian dijadikan jamu," kenang Rustini atau biasa dikenal dengan nama Sujud.
Untuk membuat jamu Rustini mengaku telah memiliki kemampuan dasar, dengan kesempatan dari ICCTF bekerjasama dengan Universitas Jember dirinya mendapat pelatihan lebih lanjut, "Alhamdulilah bisa lancar, ada masukan-masukan ilmu dari para pelatih, berkembang untuk pembuatan jamu dengan pengemasan dengan botol kaca, peralatan dan ilmu saya bertambah."

Saat ini Rustini memproduksi jamu kunyit asem, sirup rempah, jahe kencur cabe. "Saya mulai mengembangkan sirup sinom, khasiat sinom selain penyegar, kemudian membuat kulit bagus, begitu pula dengan kunyit asem membuat kulit kencang. Bisa membuat jamu sendiri tentunya lebih hemat untuk konsumsi di rumah, khasiat sinom selain penyegar, kemudian membuat kulit bagus, kunyit asem membuat kulit kencang." Cerita Supmini Wardani dan Rustini memberikan pelajaran dan manfaat yang luar biasa bila manusia turut aktif dalam pelestarian lingkungan, bukan hanya memberikan keuntungan secara ekologi namun juga ekonomi.

2. ICCTF Terima Sorgum Bioguma dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

ICCTF siap memanfaatkan dan mengembangkan varietas unggul baru sorgum bioguma hasil dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Pada 12 Agustus 2019 telah diadakan penandatangan perjanjian kerjasama antara Balitbangtan dengan ICCTF.

"Benih varietas unggul ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian di daerah-daerah yang secara iklim memang terjadi perubahan iklim. Jadi masyarakat harus mempunyai pilihan agar produktivitas lahan mereka tetap terjaga," ujar Project Team Leader ICCTF, Sudaryanto yang menjadi perwakilan penerima benih sorgum sebanyak 50 kiogram. Rencananya benih sorgum ini akan dikembangkan di lokasi proyek pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan di sejumlah provinsi sebagai bahan pangan dan pakan.

Tak hanya ICCTF, ada juga perusahaan swasta yaitu PT Inti Daya Kencana dan PT Anggro Indah Permata 21 yang turut menerima benih sorgum unggulan ini. Kepala Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BB Biogen) Balitbangtan, Mastur PhD menyambut baik kerja sama yang dijalin. Menurutnya, sorgum memiliki kemampuan multiplikasi yang cukup tinggi. Setiap 1 hektar membutuhkan 10 kilogram yang akan menghasilkan 200 kilogram benih.

"Untuk memperbanyak benih sorgum perlu kerja sama dengan para penangkar benih dan pihak Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang ada di setiap provinsi," ujar Mastur. Mastur menambahkan, dalam waktu dekat akan diadakan workshop yang akan mengundang pelaku dari berbagai bidang untuk pengembangan sorgum manis ini. Baik dari aspek pemuliaan, budidya, pascapanen maupun mekanisasi.

Selain sorgum bioguma, Balitbangtan juga memiliki beberapa varietas unggul baru yang segera di-launching, diantaranya kedelai biosoy, padi biopatenggang dan jeruk tanpa biji.

Keuangan & Audit

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menganut prinsip transparansi dan akuntabel, Laporan Keuangan ICCTF setiap tahunnya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Internasional dan Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Pada tahun 2019, audit Laporan Keuangan ICCTF dilakukan untuk Dana Hibah DANIDA Periode Januari – Maret 2019 oleh Kantor Akuntan Publik Wisnu Karsono Soewito & Rekan (JPA International) dengan opini wajar tanpa pengecualian. Untuk Kuartal III ini, sudah dilakukan lelang untuk Konsultan Audit untuk Dana USAID dan UKCCU. Pekerjaan Audit untuk Hibah USAID dan UKCCU akan dimulai pada Kuartal III tahun 2019.

Informasi Keuangan
Periode 1 Januari – 30 September 2019

Sebagai satu-satunya Lembaga Dana Perwalian Perubahan Iklim Nasional di Indonesia, ICCTF selalu memegang prinsip akuntabiltas dan transparansi dalam setiap kegiatan terkait keuangan sehingga, prinsip tata kelola organisasi dapat tercapai.
Bagian Keuangan ICCTF secara rutin mengadministrasikan, menyiapkan dan melaporkan semua kegiatan pelaksanaan secara tertib dan sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik. Pada tahun 2019 ICCTF mengelola dana Rupiah Murni APBN sebesar 34,47M dan dana Hibah Luar Negeri sebesar 29,97M. Total dana yang dikelola Tahun 2019 adalah 64,4M. Capaian sampai dengan kuartal 3 tahun 2019 adalah 63% dari total dana yang dikelola sebesar Rp. 40.651.262.318,-.

Untuk rincian alokasi dana tersebut, bisa dilihat pada table di bawah ini:

Sumber Dana	Anggaran	Penyerapan		Komitmen	Total Penyerapan + Komitmen		Sisa Anggaran	
APBN - Sekretariat ICCTF	6.289.405.000	3.377.149.349	54%	2.882.452.247	6.259.601.596	100%	29.803.404	0%
APBN - DM ICCTF	3.000.000.000	2.801.525.579	93%	198.474.421	3.000.000.000	100%	-	0%
APBN - Pokja I ICCTF	10.430.595.000	6.972.005.833	67%	3.378.582.981	10.350.588.814	99%	80.006.186	1%
APBN - Pokja II ICCTF	4.500.000.000	2.418.606.208	54%	-	2.418.606.208	54%	2.081.393.792	46%
APBN - Pokja III ICCTF	9.500.000.000	5.326.035.293	56%	1.895.610.750	7.221.646.043	76%	2.278.353.957	24%
HIBAH - Pokja III ICCTF	200.000.000	-	0%	200.000.000	200.000.000	100%	-	0%
PPK	750.000.000	510.633.732	68%	-	510.633.732	68%	239.366.268	32%
DANIDA - SDGs	2.480.808.808	2.480.808.808	100%	-	2.480.808.808	100%	-	0%
USAID	7.534.738.695	5.291.180.424	70%	2.243.558.270	7.534.738.695	100%	-	0%
UKCCU	19.764.197.285	11.473.317.092	58%	7.817.985.928	19.291.303.020	98%	472.894.265	5%
TOTAL	**64.449.744.787**	**40.651.262.318**	**63%**	**18.616.664.597**	**59.267.926.915**	**92%**	**5.181.817.872**	**8%**

Pada kuartal ini, proyek ICCTF yang didanai hibah USAID dan UKCCU telah dilakukan audit eksternal oleh KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan untuk periode Januari-Juni 2019.

KONSEP UNTUK
BAHAN DISKUSI

THE INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF)
SUSTAINABLE FOREST AND PEAT LAND MANAGEMENT
TO REDUCE EMISSION THROUGH LOCAL ACTIONS
UKCCU TRUST FUND

Financial Statement For the Six Months
Ended June 30, 2019
With Independent Auditor's Report

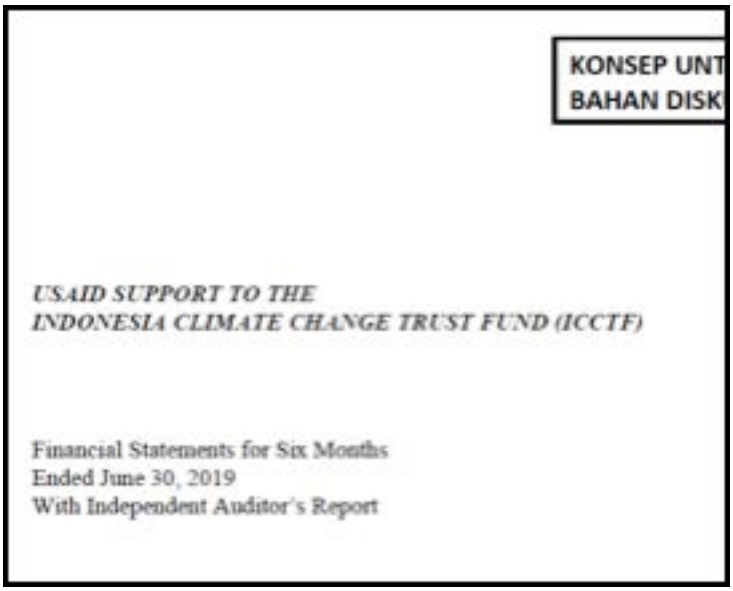
KONSEP UNT
BAHAN DISK

USAID SUPPORT TO THE
INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF)

Financial Statements for Six Months
Ended June 30, 2019
With Independent Auditor's Report

Lampiran

Media Coverage

wartaekonomi.co.id

https://id.investing.com/news/economy/pusat-batik-warna-alam-meru-betiri-dukung-prk-dan-berdayakan-warga-wonoasri-1904692

Pusat Batik Warna Alam Meru Betiri Dukung PRK dan Berdayakan Warga Wonoasri

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bekerja sama dengan Universitas Jember berhasil memberdayakan Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo sebagai Pusat Batik Warna Alam Taman Nasional Meru Betiri (TNMB).

Dengan pendanaan dari USAID, ICCTF telah menyalurkan pendanaan sejak 2017 hingga 2018 untuk program Pengelolaan Area Rehabilitasi TNMB melalui Pembangunan Desain Plot Demonstrasi Menggunakan Penutupan Vegetasi Keberlanjutan.

Program ini juga telah memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan klaster ekonomi kreatif berbasis pengetahuan dan potensi alam. Salah satunya, Batik Meru Betiri, yang dikembangkan warga Desa Wonoasri, dengan mengombinasikan corak batik khas Meru Betiri dengan pewarna alami dari daun jati, biji pohon joho lawe, daun tanaman putri malu hingga kulit kayu pohon jambal.

"Kegiatan ini contoh yang baik dalam hal sustainability project, di mana kegiatan dapat terus berjalan, bahkan semakin berkembang meskipun dukungan langsung dari ICCTF telah berakhir. Bahkan, Desa Wonoasri berhasil mengembangkan klaster ekonomi kreatif berupa batik lokal khas Meru Betiri dengan warna alami," jelas Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro usai meresmikan Desa Wonoasri sebagai Pusat Batik Meru Betiri, Rabu (31/7/2019) di Gedung Rektorat Universitas Jember.

Dia menambahkan, "Rehabilitasi kawasan hutan lindung ini turut mendukung target penurunan emisi di Jawa Timur sebesar 6.221.572 ton CO_2eq."

Pemberdayaan masyarakat sekitar TNMB, terutama turut meningkatkan kapasitas SDM, manajemen, permodalan, dan akses kepada pasar. Penggunaan pewarna alam berasal dari akar dan batang tanaman mangrove, daun jati dan tumbuhan putri malu dan sebagainya.

Terdapat 13 motif batik yang bersumber dari kekayaan hayati TNMB, baik flora maupun flora, misalnya motif samber elang, lembah padmosari, jejak matul, siput meru, botol cabe, rekahan rafflesia, pucuk cabe jawa, kuncup cabe, kepak elang, tapak asri, lebah meru, hingga alas meru.

Sejak awal 2018, terbentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang memanfaatkan kekayaan alam TNMB mulai dari batik warna alam, minuman herbal hingga camilan khas Desa Wonoasri.

Menurut Rektor Universitas Jember Moh Hasan, awalnya program rehabilitasi TNMB ini dilakukan dalam enam subprogram, di antaranya penanaman tanaman ekonomi nonkayu, peningkatan kesuburan dan daya sangga tanah, penilaian ekologi kawasan rehabilitasi, pembuatan hutan kolong dan pekarangan, perumusan kerja sama baru antara TNMB dan masyarakat, serta pemberdayaan warga Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo sebagai daerah penyangga TNMB.

Fakta menunjukan banyak warga Desa Wonoasri yang merantau dan menjadi buruh migran. Dengan mempertimbangkan aspek sosial, pertumbuhan ekonomi, serta lingkungan, para peneliti Universitas Jember memfasilitasi kelompok pembatik Kehati yang beranggotakan 46 orang untuk mendapatkan pelatihan membatik dengan pewarna alam dari TNMB.

Bambang berharap apa yang dilakukan Kementerian PPN/ Bappenas, ICCTF, USAID, dan Universitas Jember dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca, yang sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat, dapat menjadi langkah awal dan contoh yang baik, yang dapat menginspirasi berbagai pihak.

"Kegiatan ini jadi salah satu contoh konkrit pembangunan rendah karbon (PRK). Kegiatan yang dilakukan adalah rehabilitasi kawasan hutan sekunder, sekaligus melakukan aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan, serta kohesi sosial masyarakat setempat," pungkas Bambang.

---

semarak.co

http://semarak.co/sukses-dukung-prk-dan-berdayakan-masyarakat-desa-wonoasri-diresmikan-jadi-pusat-batik-warna/

Sukses Dukung PRK dan Berdayakan Masyarakat, Desa Wonoasri Diresmikan Jadi Pusat Batik Warna

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) menggandeng Universitas Jember berhasil memberdayakan Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo sebagai Pusat Batik Warna Alam Taman Nasional Meru Betiri (TNMB).

Dengan pendanaan dari USAID, ICCTF telah menyalurkan pendanaan sejak 2017 hingga 2018 untuk program “Pengelolaan Area Rehabilitasi TNMB melalui Pembangunan Desain Plot Demonstrasi Menggunakan Penutupan Vegetasi Keberlanjutan”.

Tak hanya berhasil melakukan rehabilitasi dan meningkatkan produktivitas TNMB, program ini juga berhasil memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan klaster ekonomi kreatif berbasis pengetahuan dan potensi alam.

Salah satunya adalah Batik Meru Betiri, yang dikembangkan masyarakat Desa Wonoasri, dengan mengkombinasikan corak batik khas Meru Betiri dengan pewarna alami dari daun jati, biji pohon joho lawe, daun tanaman putri malu, hingga kulit kayu pohon jambal.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, kegiatan ini menjadi contoh yang baik dalam hal sustainability project. Di mana kegiatan dapat terus berjalan bahkan semakin berkembang meskipun dukungan langsung dari ICCTF telah berakhir.

Bahkan salah satu desa yang menjadi lokasi pelaksanaan proyek, yaitu Desa Wonoasri, berhasil mengembangkan klaster ekonomi kreatif berupa batik lokal khas Meru Betiri dengan warna alami.

“Saya mengapresiasi berbagai penelitian yang dilakukan Universitas Jember, salah satunya adalah kerja sama dan kolaborasi dalam mengelola kawasan TNMB ini. Rehabilitasi kawasan hutan lindung ini turut mendukung target penurunan emisi di Jawa Timur sebesar 6.221.572 ton CO2eq,” jelas Bambang usai meresmikan Desa Wonoasri sebagai Pusat Batik Meru Betiri, Rabu (31/7/2019) di Gedung Rektorat Universitas Jember seperti dirilis Humas Kementerian PPN/Bappenas.

Pemberdayaan masyarakat sekitar TNMB terutama turut meningkatkan kapasitas SDM, manajemen, permodalan, dan akses kepada pasar. Penggunaan pewarna alam berasal dari akar dan batang tanaman mangrove, daun jati dan tumbuhan putri malu dan sebagainya.

Terdapat 13 motif batik yang bersumber dari kekayaan hayati TNMB baik flora maupun flora, misalnya motif samber elang, lembah padmosari, jejak matul, siput meru, botol cabe, rekahan rafflesia, pucuk cabe jawa, kuncup cabe, kepak elang, tapak asri, lebah meru, hingga alas meru.

Sejak awal 2018, terbentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang memanfaatkan kekayaan alam TNMB mulai dari batik warna alam, minuman herbal hingga camilan khas Desa Wonoasri.

Rektor Universitas Jember Moh. Hasan menjelaskan awalnya program rehabilitasi TNMB ini dilaksanakan dalam enam subprogram di antaranya penanaman tanaman ekonomi non kayu, peningkatan kesuburan dan daya sangga tanah, penilaian ekologi kawasan rehabilitasi, pembuatan hutan kolong dan pekarangan.

Lantas perumusan kerjasama baru antara TNMB dengan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo sebagai daerah penyangga TNMB.

Fakta menunjukan banyak masyarakatDesa Wonoasri yang merantau dan menjadi buruh migran. Dengan mempertimbangkan aspek sosial, pertumbuhan ekonomi, serta lingkungan, para peneliti Universitas Jember memfasilitasi kelompok pembatik Kehati yang beranggotakan 46 orang untuk mendapatkan pelatihan membatik dengan pewarna alam yang berasal dari TNMB.

Menteri Bambang berharap apa yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas, ICCTF, USAID, dan Universitas Jember dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat, dapat menjadi langkah awal dan contoh yang baik, yang dapat menginspirasi berbagai pihak untuk mereplikasi. “Kegiatan ini menjadi salah satu contoh konkret Pembangunan Rendah Karbon (PRK), di mana kegiatan yang dilakukan adalah rehabilitasi kawasan hutan sekunder, sekaligus melakukan aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan serta kohesi sosial masyarakat setempat,” timpal Bambang. Semoga dapat menginspirasi pemerintah daerahdengan mencantumkan kegiatan PRK dalam agenda dan dokumen perencanaannya sebagai bagian dari proses replikasi dan scaling up. (lin)

---

antaranews.com

https://jatim.antaranews.com/berita/309074/desa-wonoasri-jember-diresmikan-sebagai-pusat-batik-warna-alam-taman-nasional-meru-betiri

Desa Wonoasri Jember diresmikan sebagai pusat batik warna alam Taman Nasional Meru Betiri

"Dengan diresmikan nya Desa Wonoasri sebagai pusat batik Meru Betiri maka masyarakat terutama kelompok usaha dan kelompok perempuan dilibatkan dalam pelestarian alam sekaligus memberi akses pemberdayaan ekonomi"

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Desa Wonoasri di Kabupaten Jember, Jawa Timur diresmikan sebagai pusat batik warna alam di Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) yang diberdayakan oleh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bekerja sama dengan Universitas Jember.

Dengan pendanaan dari USAID sejak tahun 2017 hingga 2018, Indonesia Climate Change Trust Fund telah

menyalurkan pendanaan untuk program "Pengelolaan Area Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri Melalui Pembangunan Desain Plot Demonstrasi Menggunakan Penutupan Vegetasi Keberlanjutan".

"Tak hanya berhasil dalam melakukan rehabilitasi dan meningkatkan produktivitas kawasan Taman Nasional Meru Betiri, program itu juga berhasil memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan klaster ekonomi kreatif berbasis pengetahuan dan potensi alam," kata Rektor Unej Moh Hasan di Jember, Rabu.

Salah satu hasil inovatif dari klaster ekonomi masyarakat tersebut adalah Batik Meru Betiri yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Wonoasri, dengan mengkombinasikan corak batik khas Meru Betiri dengan pewarna yang berasal dari alam misalnya daun jati, biji pohon joho lawe, daun tanaman putri malu, hingga kulit kayu pohon jambal.

"Dengan pertimbangan tersebut, Desa Wonoasri di Kecamatan Tempurejo diresmikan sebagai pusat batik Meru Betiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Prof. Bambang Brodjonegoro," tuturnya.

Pemberdayaan masyarakat sekitar TNMB itu turut meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, manajemen, permodalan dan akses kepada pasar sekaligus memanfaatkan kekayaan alam TNMB karena penggunaan pewarna alam berasal dari akar dan batang tanaman mangrove, daun jati dan tumbuhan putri malu dan sebagainya.

Terdapat 13 motif batik yang bersumber dari kekayaan hayati TNMB baik flora maupun flora misalnya motif samber elang, lembah padmosari, jejak matul, siput meru, botol cabe, rekahan rafflesia, pucuk cabe jawa, kuncup cabe, kepak elang, tapak asri, lebah meru, hingga alas meru. Sejak awal 2018 sudah terbentuk berbagai Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang memanfaatkan kekayaan alam TNMB mulai dari KUBE Batik Warna Alam, minuman herbal hingga camilan khas Desa Wonoasri.

Program rehabilitasi kawasan hutan lindung itu turut mendukung target penurunan emisi di Provinsi Jawa Timur bidang Kehutanan tahun 2013-2020 adalah sebesar 6.221.572 ton CO_2eq (Pergub Jawa Timur No. 67 tahun 2012).

"Dengan diresmikan nya Desa Wonoasri sebagai pusat batik Meru Betiri maka masyarakat terutama kelompok usaha dan kelompok perempuan dilibatkan dalam pelestarian alam sekaligus memberi akses pemberdayaan ekonomi," katanya. Ia menjelaskan awalnya program rehabilitasi TNMB itu dilaksanakan dalam enam sub program yakni penanaman tanaman ekonomi non kayu, peningkatan kesuburan dan daya sangga tanah, penilaian ekologi kawasan rehabilitasi, pembuatan hutan kolong dan pekarangan.

"Selain itu, dilakukan perumusan kerja sama baru antara Tanam Nasional Meru Betiri dengan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat Desa Wonoasri sebagai daerah penyangga TNMB karena berdasarkan fakta bahwa banyak warga Desa Wonoasri yang merantau dan menjadi buruh migran," katanya.

Dengan mempertimbangkan aspek perkembangan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta memperhatikan lingkungan dalam perkembangannya para peneliti Universitas Jember memfasilitasi kelompok pembatik Kehati yang beranggotakan 46 orang untuk mendapatkan pelatihan membatik dengan pewarna alam yang berasal dari TNMB.

Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan harapan bahwa apa yang dilakukan Bappenas, ICCTF, USAID dan Unej dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat, dapat menjadi langkah awal dan contoh yang baik, yang dapat menginspirasi bagi pihak-pihak lain untuk melakukan replikasi.

"Bappenas melalui ICCTF memberikan hibah kepada kelompok binaan Unej di antaranya batik dan mereka menghasilkan batik tanpa memgganggu lingkungan hutan dan menggunakan ide dan inspirasi dari hutan, sehingga saya sangat mengapresiasi hal itu," katanya. (*)

---

radarjember.jawapos.com

https://radarjember.jawapos.com/2019/07/31/jember-miliki-kampung-batik-pewarna-alam/

Jember Miliki Kampung Batik Pewarna Alam

RADARJEMBER.ID, JEMBER – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, meresmikan batik tulis Jember khas Meru

Betiri, Rabu (31/7). Peresmian dilakukan di halaman depan Gedung Rektorat Universitas Jember.

Batik khas Meru Betiri ini merupakan hasil kerjasama Universitas Jember dengan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) yang didukung USAID sejak 2017 hingga 2018 lalu. Dua lembaga ini memberdayakan masyarakat di Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo sebagai pusat batik warna alam Taman Nasional Meru Betiri (TNMB).

Bambang Brodjonegoro menjelaskan, apa yang dilakukan Bappenas, ICCTF, USAID dan Universitas Jember dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca yang sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat, dapat menjadi langkah awal dan contoh yang baik. Sehingga dapat menginspirasi bagi pihak-pihak lain untuk melakukan replikasi.

Bentuk motif batik Meru Betiri meluncurkan banyak varian. Terdapat 13 motif batik yang semuanya bersumber dari kekayaan hayati TNMB. Tak hanya itu, semua batik tulis karya ibu-ibu Desa Wonoasri adalah batik tulis yang menggunakan pewarna alami. (*)

Jawa Pos-Radar Jember
1 Agustus 2019

Menteri PPN Apresiasi Batik Ramah Lingkungan

Jawa Pos
RADAR JEMBER
Menteri PPN Apresiasi Batik Ramah Lingkungan

TEGALBOTO, Radar Jember - Tinggal di kawasan penyangga dan hutan Taman Nasional Meru Betiri tak sepenuhnya menjadikan masyarakatnya tertinggal, Hal itu justru memunculkan potensi baru yang bisa dikembangkan. Yakni batik khas warna alam Meru Betiri di Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo.

Batik yang menggunakan warna dari daun dan akar beberapa pohon ini mendapatkan apresiasi dari Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro. Dia meresmikan Desa Wonoasri sebagai pusat batik warna alam Meru Betiri di halaman Rektorat Universitas Jember, kemarin (31/7).

Menurut Bambang, batik Meru Betiri merupakan salah satu inovasi dari klaster ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Wonoasri. Yakni batik yang dihasilkan tanpa mengganggu lingkungan hutan itu sendiri. Justru pengembangannya terisnpirasi dari hutan. Dia mengapresiasi inovasi batik yang dikembangkan oleh masyarakat itu. Kombinasi corak batik khas Meru Betiri cukup unik. Menggunakan pewarna yang berasal dari alam seperti daun biji jati, biji pohon joho lawe, daun tanaman putri malu, hingga kulit kayu pohon jambal.

Pemberdayaan warga dalam membuat batik itu dilakukan oleh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bersama dengan Universitas Jember. Yakni dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, managemen, dan permodalan.

---

https://www.gatra.com/detail/news/437700/technology/lipi-promosikan-wadah-riset-kemaritiman-indonesia
15 Aug 2019

LIPI Promosikan Wadah Riset Kemaritiman Indonesia

Jakarta, Gatra.com - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama dengan kementerian dan lembaga terkait mempromosikan program Coral Reef Rehabilitation Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) untuk mendukung penguatan sektor kelautan

di Indonesia. Program tersebut diwujudkan dengan pembentukan Konsorsium Riset Samudera (KRS). "KRS ini menjadi solusi utama kita untuk menjawab tantangan 74 tahun Indonesia. Karena kita tahu sendiri selama lima tahun terakhir maritim menjadi prioritas utama kita, tetapi selama ini kita belum banyak bisa berbuat, khususnya yang terkait riset maritim," ucap Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko saat konferensi pers di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Kamis (15/8).

Handoko mengatakan dengan adanya KRS tersebut misi kemaritiman Indonesia bisa diwujudkan karena KRS akan menjadi wadah yang menyatukan riset terkait maritim. Riset tersebut juga bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dengan memperluas pengaruh kedaulatan negara ke seluruh pulau terluar di Indonesia.

"Yang ingin kita kembangkan untuk 2020-2024 adalah science-based policy, kebijakan berbasis sains termasuk di bidang kemaritiman. Oleh karena itu kita perlu data dan informasi akurat yang dapat dipertanggung jawabkan untuk semua hal terkait maritim kita," ujar Deputi Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Arifin Rudiyanto di kesempatan yang sama.

Menurut Arifin dengan adanya KRS, pemerintah bisa lebih mengetahui apa potensi yang ada di permukaan dan dasar laut Indonesia dimana nantinya hasil riset yang ada bisa diakses oleh pihak manapun.

"Peran pemerintah di sini sebagai regulator dan fasilitator. Sehingga ide KRS ini utamanya adalah mengajak semua pihak sehingga bisa memberi nilai tambah bagi pembangunan secara umum," katanya.

KRS sendiri sudah dideklarasikan sejak 2017 diikuti oleh berbagai pihak seperti Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan berbagai universitas di Indonesia.

Kegiatan COREMAP-CTI dilakukan sebagai bentuk ekspose untuk menyampaikan konsep dan gagasan KRS kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

---

https://news.trubus.id/baca/30831/lipi-dan-bappenas-kerja-sama-riset-samudera-untuk-pembangunan-sektor-kelautan-yang-kuat
15 Agustus 2019

LIPI dan Bappenas Kerja Sama Riset Samudera untuk Pembangunan Sektor Kelautan yang Kuat

Berdasarkan Laporan Lembaga Program Lingkungan PBB (UNEP), nilai ekonomi dari wilayah Inisiatif Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle Initiative) mencapai angka USD 14 miliar yang berasal dari sektor pariwisata, perikanan dan pemanfaatan infrastruktur pantai.

Nilai tersebut memiliki potensi perkembangan mencapai USD 37 miliar di 2030 apabila kondisi ekosistem terumbu karang terus terkelola dengan baik. Dari proyeksi jumlah tersebut, sebesar USD 2,6 miliar merupakan nilai aset yang akan dimiliki Indonesia. Coral Reef Rehabilitation Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) dan Konsorsium Riset Samudera (KRS) hadir untuk membangun sektor kelautan di Indonesia.

Mengusung tema “Our Action for Healthy Coral and Better Ocean”, Ekspose COREMAP-CTI dan KRS bertujuan untuk menjadi wadah memperkenalkan COREMAP-CTI dan KRS kepada pemangku kepentingan terkait serta masyarakat luas, serta menjaring masukan substansial terkait pengelolaan kawasan pesisir dan samudera. Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya pembangunan kelautan yang kuat, terstruktur, dan komprehensif.

Aspek riset menjadi bagian yang penting terhadap upaya pelestarian sumberdaya kelautan, ekosistem terkait, dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

“Riset yang terintegrasi diharapkan dapat menghasilkan inovasi dan rekomendasi terkait pengelolaan ekosistem pesisir dan samudera yang strategis,” demikian disampaikan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Laksana Tri Handoko di Jakarta, Kamis (14/8).

Agenda riset tersebut telah dijalankan dengan melakukan kolaborasi lintas instansi dan lembaga penelitian dalam bentuk Konsosium Riset Samudera (KRS).

Sebagai informasi, konsorsium ini beranggotakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; LIPI; Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika; Badan Informasi Geospasial; Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; Pushidros TNI AL, dan perguruan tinggi.

Lebih lanjut Handoko menjelaskan, wadah riset tersebut bertumpu pada program prioritas nasional dengan mengklasterisasi riset dalam beberapa hal.

“Klasterisasi riset dalam program prioritas nasional terdiri

dari keanekaragaman hayati dan konservasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, geosains kelautan, serta observasi laut dan iklim," terangnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa turunan dari klasterisasi riset tersebut mencakup beberapa aspek, seperti pertahanan dan keamanan maritim; pemanfaatan ruang laut; perekonomian maritim yang maju dan mandiri; pendayagunaan sumberdaya alam yang berkelanjutan; perlindungan fungsi lingkungan laut; dan infrastruktur maritim; serta strategi nasional menghadapi perubahan global.

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Gellwynn Jusuf pembentukan KRS senada dengan visi Presiden Joko Widodo dan tercantum pada target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nomor 14 tentang Ekosistem Laut, yakni pengelolaan sektor kelautan dengan perencanaan berbasis IPTEK disertai ketersediaan informasi pengetahuan yang memadai.

"Sementera COREMAP-CTI merupakan upaya pemerintah dalam menjaga kawasan pesisir, secara khusus pada ekosistem terumbu karang agar tetap dikelola secara optimal dan lestari," ujarnya.

Gellwyn menjelaskan, program ini akan menjadi stimulus bagi peningkatan nilai aset terumbu karang dan sumber daya terkait guna memperkukuh pilar kemakmuran masyarakat pesisir dan kemajuan bangsa Indonesia.

Dirinya menjelaskan, komitmen COREMAP-CTI dan KRS merupakan kunci dalam menghasilkan peningkatan kualitas riset yang menjadi landasan rekomendasi dalam menentukan arah kebijakan sektor kelautan.

"COREMAP-CTI menjadi wadah strategis dalam mengembangkan IPTEK serta meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan kemaritiman. Kolaborasi peneliti dan akademisi yang dihimpun oleh KRS, turut berperan dalam pembangunan pondasi SDM berkualitas yang menguasai iptek," tandasnya. [NN]

---

https://news.trubus.id/baca/30846/konsorsium-riset-samudera-pemerintah-perkuat-sektor-maritim-indonesia
15 Agustus 2019

Konsorsium Riset Samudera, Pemerintah Perkuat Sektor Maritim Indonesia

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tengah melakukan program Coral Reef Rehabilitation Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) dan Konsorsium Riset Samudera.

Kepala LIPI Laksana Tri Handoko mengungkapkan bahwa program COREMAP-CTI guna mendukung penguatan sektor kelautan nusantara. Program tersebut diperbuat dengan dibentuknya Konsorsium Riset Samudera (KRS).

Meski telah berjalan sejak tahun 2017, proyek Konsorsium Riset Samudra, Laksana mengakui bahwa Indonesia membutuhkan kapal riset serta dermaga.

"Yang saat ini, (dekat dengan pendanaannya) berasal dari hibahan luar negeri sebesar US$116 juta dolar. Ini yang direncanakan setidaknya kita memiliki 2 kapal yang powerful yang bisa dipakai sebagai infrastruktur dasar untuk Konsorsium Riset Samudera," jelas Laksana Tri Handoko ketika memberikan pernyataan pers terkait Konsorsium Riset Samudera, di Hoten Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/19).

Lebih lanjut Laksana mengatakan, membutuhkan waktu 26 bulan untuk masa konstruksi 1 kapal riset. Dirinya berharap tahun 2022 dua kapal riset tersebut sudah masuk ke Indonesia. Sebagaimana diketahui dua unit kapal riset ini masing-masing berukuran 85 meter.

"Itu sebabnya kita sudah mencari dan mendesign program dengan membuka panggilan terbuka untuk proposal program dan kapal riset. Insya Allah dalam bulan ini atau bulan depan, sehingga kita bisa mendesign program bersama-sama dengan konsorsium di awal tahun depan," tambahnya.

"Kalau untuk instrumen kapal secara keseluruhan, saat ini sedang dialokasikan di Cibinong Science Center. Karena disitu semuanya di bawah kontrol kita, sehingga Insya Allah tidak banyak kendala," ujarnya kembali.

Terkait dermaga, Laksana menjelaskan bahwa, telah direncanakan dermaga khusus kapal riset, tapi ini juga menjadi salah satu kendala karena cukup memakan waktu untuk pengerjaannya.

"Untuk saat ini kita belum memprioritaskan dermaga itu, meskipun proses itu tetap kita jalankan, dengan Pemprov DKI. Sekarang Pemprov DKI Jakarta juga tengah membahas tata ruang pesisir. Sekaligus untuk mengakomodasi dermaga khusus untuk kapal riset nasional," pungkasnya.

SUPPORTING THE INDONESIAN GOVERNMENT FOR A BETTER CLIMATE

ICCTF Sekretariat
Lippo Kuningan, Lt. 15,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12,
Jakarta 12940, Indonesia
P +62 (21) 8067 9314
F +62 (21) 8067 9315
E secretariat@icctf.or.id
W www.icctf.or.id

ICCTF_ID icctfofficial ICCTF Indonesia Climate Change Trust Fund